



**PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG: PROYEK
MUHAMMAD HUSNI THAMRIN DI JAKARTA TAHUN
1969—1979**

Imam Hilman

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
2008



**PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG: PROYEK
MUHAMMAD HUSNI THAMRIN DI JAKARTA TAHUN
1969—1979**

Skripsi
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai gelar
Sarjana Humaniora

Oleh
Imam Hilman
0703040153

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
2008

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008

PANITIA UJIAN

Ketua

(Dr. Magdalia Alfian)

Pembimbing I/Panitera

(Siswantari, M. Hum)

Pembimbing II

(Dra. M.P.B Manus)

Pembaca /Penguji

(Sudarini Suhartono, M. A.)

Disahkan pada hari....., tanggal.....2008 oleh:

Koordinator Program Studi Ilmu Sejarah FIB UI

(Dr. Muhammad Iskandar)

Dekan FIB UI

(Dr. Bambang Wibawarta)

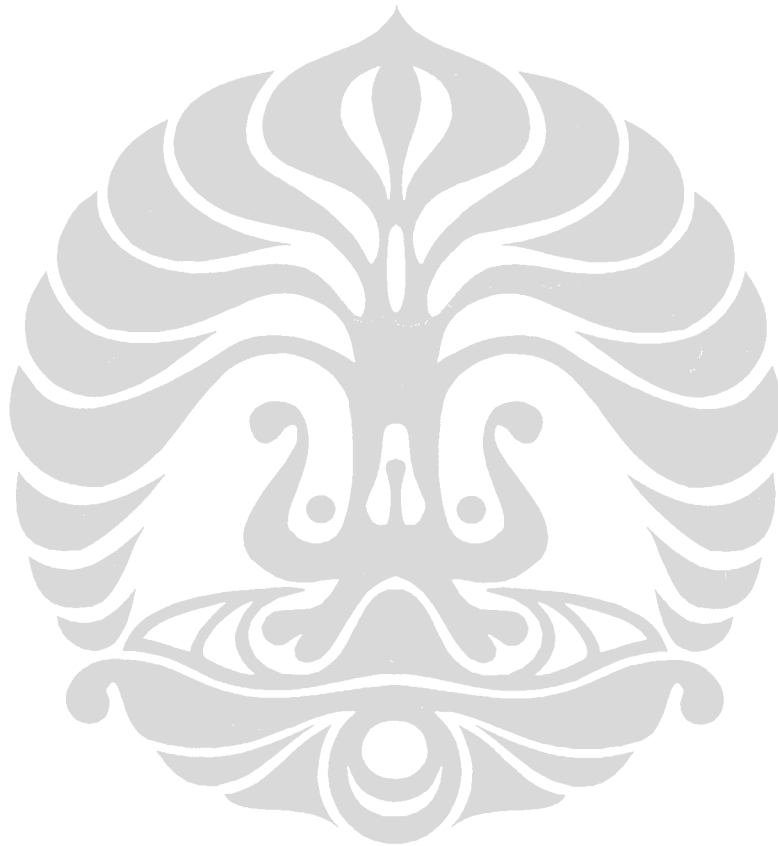
Seluruh isi dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Depok,

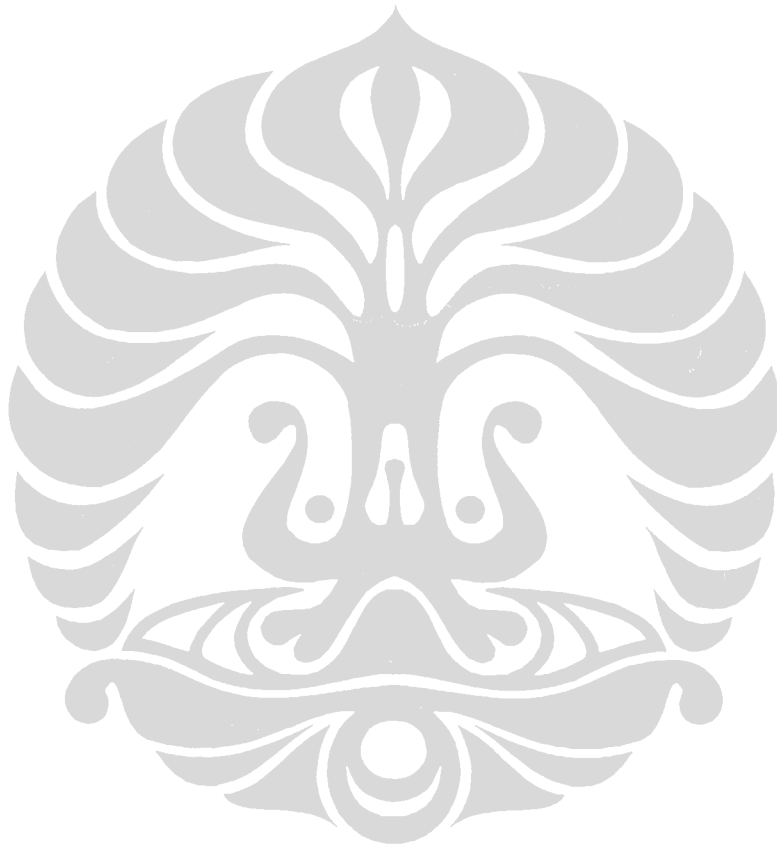
2008

Imam Hilman

NPM. 0703040153



“Tiada makna dan arti dalam hidup tanpa kasih sayang serta restu orang tua menyertai”



Untuk mama, mama, dan mama yang telah melahirkan dan membesarkan diriku. Juga kepada Bapak yang telah memberikan segalanya buatku, serta kakak dan adik-adikku yang selalu kucintai. Terima kasih atas doa yang telah kalian berikan, semoga segala kebaikan di balas oleh Nya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT sang pemberi ilmu yang Maha Kuasa atas terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini ditulis dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya karena dorongan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Siswantari, M. Hum, selaku pembimbing skripsi. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau telah bersedia menyisihkan waktu serta perhatiannya untuk membaca dan memberikan saran serta masukan yang amat berharga mengenai isi skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Dra. M.P.B. Manus, sebagai pembimbing II yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk membaca dan meneliti dengan seksama naskah skripsi ini ditengah kesibukannya. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengajar di Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang telah membagikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.

Kepada kedua orang tua penulis, mama dan papa yang selalu memberikan dorongan, semangat, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis, serta membiayai penulis untuk menyelesaikan kuliah. Jasamu selalu kukenang dan melekat dalam

ragaku. Do'a restu kalian hanya bisa penulis balas dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Seandainya skripsi ini dapat dianggap sebagai bentuk ucapan terima kasih, maka sudah pasti tidak akan ada artinya bila dibandingkan dengan kasih sayang kalian. Terima Kasih juga untuk kakak, serta ketiga adikku yang selalu kuingatkan agar selalu giat belajar untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan, mari bersama-sama kita buat bangga kedua orang tua kita. Kepada Lala yang selalu memotivasi penulis, serta memberi perhatian yang tak pernah henti-hentinya disaat penulis merasa patah arah dan butuh bersandar. *Thank you for all n I luv u honey..*

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dr. Darrundono, yang selalu *welcome* kepada penulis untuk memberikan sumber serta pengalaman tentang tema skripsi ini, sumber yang bapak berikan sangat berarti bagi penulis.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman di Program Studi Ilmu Sejarah, terutama Angkatan 2003, yang telah memberikan saran dan kritik, baik selama masa perkuliahan maupun selama penyusunan skripsi ini. Canda dan tawa yang kalian berikan merupakan sarana untuk melepaskan kejenuhan selama penyusunan skripsi ini. Teman-teman di kons yang telah banyak membantu, jasa-jasamu tak akan pernah ku lupa.

Depok, Juli 2008

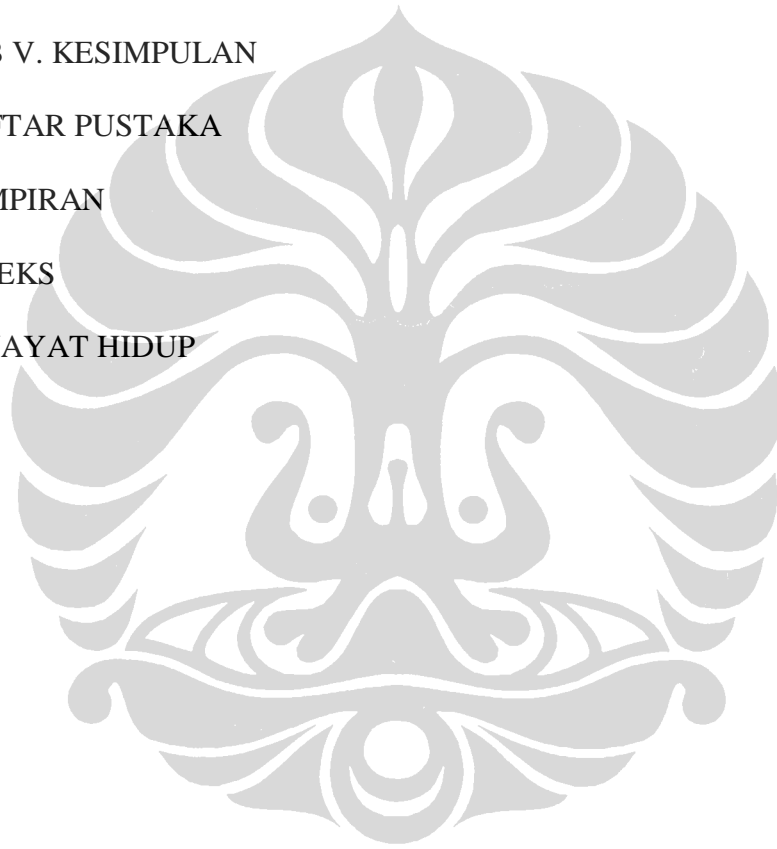
Imam Hilman

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR ISTILAH	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAKSI	x
BAB 1 . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tinjauan Pustaka	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Ruang Lingkup Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sumber Sejarah	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II . JAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN ALI SADIKIN	
1966-1977	12
A. Situasi dan Kondisi Kota Jakarta	15
B. Jakarta Masa Gubernur Ali Sadikin	18
B. 1. Pengangkatan Ali Sadikin Sebagai Gubernur DKI Jakarta	18

B. 2. Kebijakan Ali Sadikin dalam Pembangunan Kota Jakarta	19
B. 3. Problema Jakarta di Awal Pemerintahan Ali Sadikin	21
B. 4. Program Pengembangan Fisik Kota Jakarta Masa Ali Sadikin	22
B. 5. Masalah dan Faktor-faktor Dalam Pengembangan Fisik Kota Jakarta	23
C. Urbanisasi Mengakibatkan Timbulnya Pemukiman Padat Penduduk	
Jakarta 1960-1970	27
C. 1. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik	29
C. 2. Daya Tarik Kota Jakarta	32
C. 3. Masalah-masalah Serta Pemecahannya yang Timbul Akibat	
Urbanisasi	33
BAB III . PROGRAM PERBAIKAN KAMPUNG: PROYEK MUHAMMAD HUSNI	
THAMRIN DI JAKARTA 1969-1979	35
A. Awal Dicetuskannya Program Perbaikan Kampung Tahun 1969	35
B. Keadaan Sosial Masyarakat Kampung	42
C. Perencanaan Program Perbaikan Kampung	45
D. Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Pelita I dan Pelita II	50
D. 1. Mobilisasi Dana Proyek Perbaikan Kampung Melalui	
Dana APBD dan Bantuan Bank Dunia	50
D. 2. Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung: Proyek	
M.H. Thamrin	52
D. 3. Peran Masyarakat Kampung Dalam Pelaksanaan Proyek M.H.T	61
BAB IV. KONDISI KAMPUNG SETELAH PERBAIKAN PROYEK M.H. THAMRIN	64

A. Sarana dan Prasarana	70
B. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung	76
C. Masalah Lingkungan Kampung yang	77
D. Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	80
BAB V. KESIMPULAN	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	91
INDEKS	105
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR ISTILAH

Kampung: bentuk permukiman marjinal, di mana lingkungannya secara umum nampak miskin, infrastruktur yang masih buruk, tidak ada pelayanan dan penghasilan masyarakatnya masih rendah.

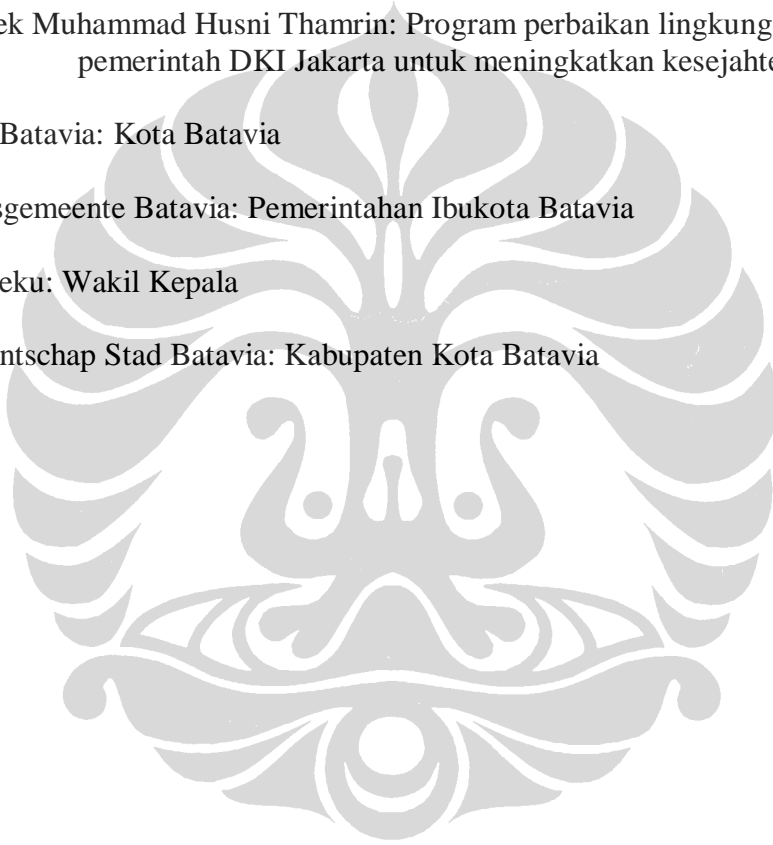
Proyek Muhammad Husni Thamrin: Program perbaikan lingkungan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Stad Batavia: Kota Batavia

Stadsgemeente Batavia: Pemerintahan Ibukota Batavia

Zyeyeku: Wakil Kepala

Regentschap Stad Batavia: Kabupaten Kota Batavia



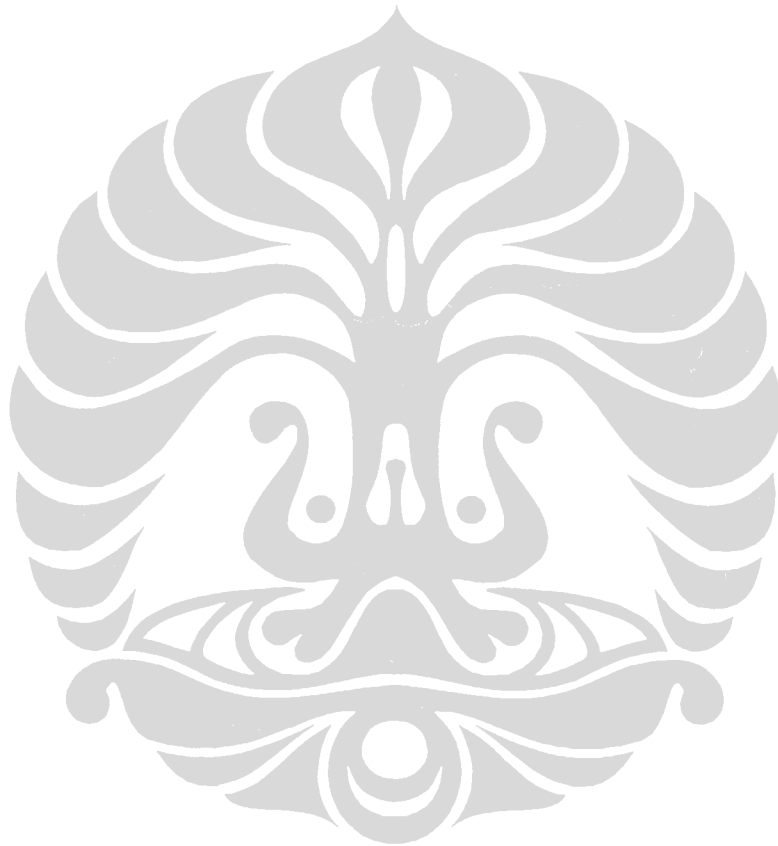
DAFTAR SINGKATAN



APBD	: Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah
BAPPEM	: Badan Pelaksana Pembangunan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
DPU	: Dinas Pekerjaan Umum
D.K.I	: Daerah Khusus Ibukota
D.U.P	: Daftar Usulan Proyek
M.C.K	: Mandi Cuci Kakus
M.H.T	: Muhammad Husni Thamrin
PCD	: Planned Community Development
PAM	: Perusahaan Air Minum
PEMILU	: Pemilihan Umum
PBB	: Persatuan Bangsa Bangsa
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SD	: Sekolah Dasar
TPA	: Tempat Pembuangan Akhir

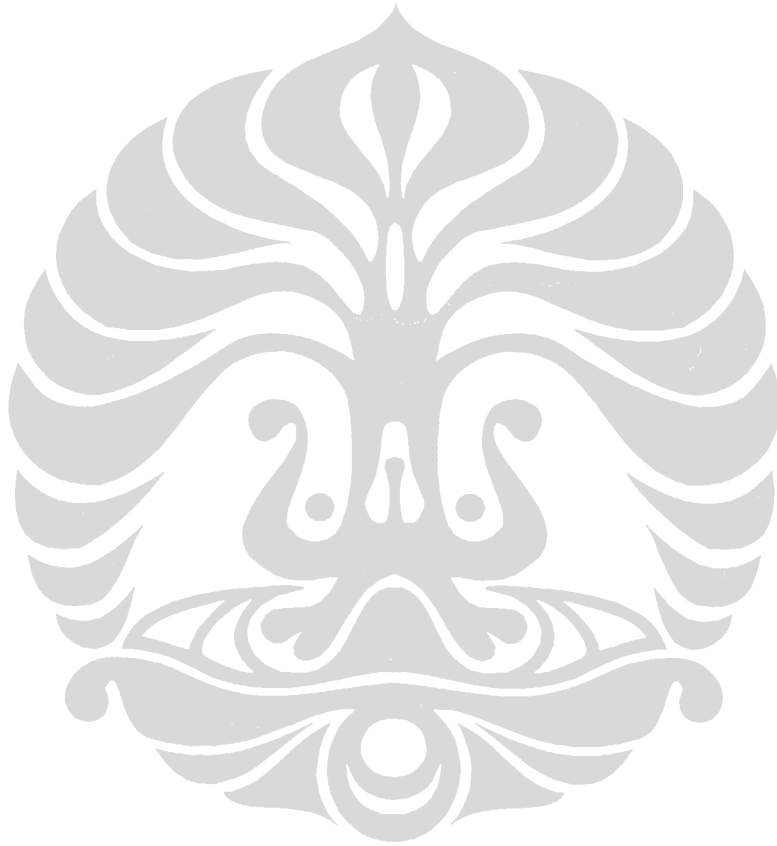
DAFTAR TABEL

1. Penduduk DKI Jakarta pada pertumbuhannya pada tahun 1961, 1971, dan 1980.
2. Jumlah keseluruhan kampung yang Sudah diperbaiki pada Pelita I dan Pelita II
3. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Proyek MHT pada Pelita I
4. Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Proyek MHT di tahun pertama Pelita II (1974-1975)



DAFTAR GAMBAR

1. Keadaan kampung di Jakarta 1960-an	37
2. Pembangunan sarana jalan dan jembatan di kampung	54
3. Jalan kampung yang sudah diperbaiki	65
4. Sarana penyediaan air bersih yang dibangun	66



ABSTRAKSI

IMAM HILMAN. Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin di Jakarta Tahun 1969 – 1979. (Di bawah bimbingan Siswantari, M. Hum. Dan Dra. M.P.B. Manus, SS.). Program Studi Ilmu Sejarah; Pengutamaan Sejarah Indonesia. Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, tahun 2008. vi + 82 halaman; 9 halaman lampiran; daftar pustaka: 6 arsip, 9 surat kabar dan majalah, 13 artikel, 18 buku, 1 disertasi, 3 tesis, 9 wawancara sejarah lisan.

Penelitian mengenai Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin di Jakarta Tahun 1969-1979 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah Perkembangan Kota Jakarta yang di dalamnya terdapat pelaksanaan program perbaikan kampung yang diadakan di Jakarta 1969. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu *heuristik*, kritik, interpretasi, dan historiografi. Selain menggunakan sumber-sumber tertulis, penelitian ini juga dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber lisan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan dilaksanakannya program perbaikan kampung di Jakarta tahun 1969-1979, telah mendorong masyarakat kampung untuk lebih peduli terhadap kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya. Program perbaikan kampung yang dicetuskan Gubernur Ali Sadikin telah mendapat tanggapan positif dari Dunia Internasional, terbukti dengan turut sertanya Bank Dunia untuk memberi bantuan terhadap program tersebut. Pada tahun 1980 program perbaikan kampung yang diadakan di Jakarta mendapat penghargaan dari Agha Khan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tahun 1969, dilaksanakan program perbaikan kampung yang dicetuskan Gubernur Ali Sadikin untuk menanggulangi keadaan kampung-kampung di Jakarta yang serba padat dan kotor.¹ Penanggulangan kampung-kampung di Jakarta ini kemudian dikenal dengan sebutan Proyek Mohammad Husni Thamrin atau disingkat Proyek MHT. Keinginan Ali Sadikin untuk membangun kota Jakarta agar representatif sebagai sebuah ibukota, tampaknya dilatarbelakangi oleh pemikirannya untuk menjadikan Jakarta sebagai Ibukota yang ideal.² Hal yang mendasari dilaksanakannya proyek MHT ini, di antaranya adalah karena 60% penduduk Jakarta masih bermukim di kampung dengan lingkungan hidup yang makin buruk, sehingga kehidupan mereka semakin tidak sehat, apatis dan kurang produktif.³ Hal lain juga dilatarbelakangi oleh pesatnya arus urbanisasi ke Jakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

¹ Kampung merupakan bentuk permukiman marjinal, di mana lingkungannya secara umum nampak miskin, infrastruktur yang masih kasar, ketiadaan pelayanan dan masyarakatnya beraneka ragam serta heterogen namun rata-rata berpenghasilan rendah, lihat Zsu Zsa Baross, " *Prospek Perubahan Bagi Golongan Miskin Kota.* " *Prisma*, Juni 1980, hlm. 23.

² Pada tahun 1964 dengan undang-undang no. 10, daerah khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai ibukota negara Republik Indonesia. Lihat Edy Sedyawati, dkk. *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980.* Jakarta : Depdikbud, 1987. hlm. 102.

³ Ratu Husmiati : *Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta 1966-1977.* Tesis Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia. Depok, 2003. hlm. 120.

Pada tahun 1960 pertambahan penduduk di Jakarta meningkat secara cepat yang diakibatkan oleh pesatnya arus urbanisasi ke Jakarta.⁴ Dalam Rencana Induk kota Jakarta 1965-1985, sebelumnya kota Jakarta diperuntukan untuk 600 ribu jiwa, namun jumlah penduduk melonjak pada tahun 1960-an menjadi 3 juta jiwa yang sebagian besar dipadati oleh kaum urban. Pesatnya arus urbanisasi tersebut menyebabkan masalah ketidakseimbangan antara kebutuhan hidup masyarakat dengan sarana-sarana yang telah tersedia, baik sarana sosial, sarana administrasi, sarana ekonomi maupun sarana fisik.⁵

Pertambahan penduduk juga menyebabkan timbulnya masalah kurangnya perumahan di Jakarta. Dalam Rencana Induk kota Jakarta 1965-1985, pembangunan perumahan di Jakarta diperlukan tambahan 50.000 buah tiap tahun untuk mencukupi kebutuhan penduduk Jakarta.⁶ Jumlah ini sangat sukar dipenuhi oleh pemerintah daerah DKI Jakarta, pada akhirnya terjadi tekanan-tekanan pada persediaan tempat tinggal yang tidak dapat terpenuhi. Masalah tersebut menyebabkan daerah perumahan meluas ke daerah-daerah perbatasan dan tempat-tempat di mana fasilitas sarana dan prasarana tidak tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, daerah-daerah ini lebih dikenal dengan sebutan “kampung”.

Jumlah yang membangun rumah di daerah perkampungan kota bertambah terus tanpa mengikuti norma-norma planologi serta syarat-syarat kesehatan.

⁴ Urbanisasi adalah suatu gejala umum yang dialami oleh Negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Lihat Darundono. “Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung”. *Widyapura*, Januari 1997. hlm.40

⁵ Sutjpto Wirosardjono : Masalah Pencemaran Lingkungan Di Daerah Padat Penduduk. *Prisma*, No.1. Februari, 1974, hlm. 39.

⁶ Sri Soewati Sesanto : Sanitasi Lingkungan Di Kota-kota Besar. *Prisma*, 1977, hlm.45.

Sekalipun mereka membangun rumah sendiri, dilihat dari bahan-bahan bangunan yang terdiri dari bahan-bahan sementara, seperti dinding yang terbuat dari papan, lantai yang tidak disemen serta atap yang terbuat dari bahan seng. Mengenai masalah penerangan, sebagian besar masyarakat kampung masih menggunakan lampu minyak tanah.

Fasilitas air bersih yang digunakan masyarakat kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti, mandi, memasak, dan minum kondisinya masih memprihatinkan, terutama di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, masyarakat setempat harus membeli air bersih untuk keperluan sehari-harinya, hal tersebut diakibatkan kondisi air yang sudah tercemar.

Kondisi lingkungan tersebut menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat yang tinggal di kampung-kampung, hampir 50% dari warga kampung seringkali terjangkit gangguan penyakit influenza, batuk pilek dan beberapa terjangkit penyakit dysentri dan penyakit kulit.⁷ Pada umumnya mereka belum mengerti tentang jenis-jenis penyakit. Hal ini diperkirakan berhubungan dengan taraf pendidikan kepala keluarga yang masih rendah.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pada umumnya kepala rumah tangga yang tinggal di kampung-kampung rata-rata berpendidikan sekolah dasar. Mengenai lapangan pekerjaan, ternyata banyak para kepala keluarga yang bekerja di bidang jasa, sisanya bekerja dibidang industri atau bidang lainnya.⁸ Sedangkan mengenai tempat tinggal. Pada umumnya penduduk tinggal di rumah

⁷ Darundono. *Loc. cit.*, hlm. 44.

⁸ Lapangan pekerjaan. Ternyata bahwa pada 23 dari 29 kampung yang diselidiki, para kepala rumah tangganya bekerja di bidang jasa, sedangkan sisanya bekerja di bidang industri atau bidang-bidang lainnya. Lihat J. Supranto : Hasil Survey Kampung-kampung DKI Yang Terkena Proyek M. Husni Thamrin. *Prisma*, 5 oktober, 1973, hlm. 85.

mereka sendiri, sedangkan lainnya menempati rumah sewaan, kontrak dan lain-lain.

Program perbaikan kampung yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta, menjadi alternatif bagi semua pemecahan masalah yang timbul pada kampung-kampung di Jakarta. Proyek MHT yang berlangsung pada tahun 1969-1979, bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas dan gairah hidup masyarakat Jakarta, membangun perkampungan dengan perencanaan yang terarah, sehingga memudahkan dilakukan penataan lebih lanjut.⁹ Sarana dan prasarana yang dibangun meliputi :

1. Prasarana: perbaikan jalan dan jembatan, penerangan/listrik, irigasi.
2. Pembangunan fasilitas kesejahteraan sosial, meliputi perbaikan dan pembangunan pos-pos kesehatan dan balai Pengobatan, tempat-tempat Pendidikan dan kebudayaan.
3. pembuatan sumur-sumur, bak-bak sampah, perumahan sehat, MCK dan bangunan- bangunan umum.

Dalam menentukan kampung-kampung yang mendapat perbaikan, terdapat beberapa kriteria-kriteria, diantaranya ialah Kondisi lingkungan yang buruk, kepadatan penduduk yang tinggi, potensi dinamika penduduk untuk melanjutkan dan memelihara hasil-hasil perbaikan, usia dari kampung itu, kampung-kampung

⁹ Ratu Husmiat., *Op. cit.*, hlm. 122.

lama yang mendapat prioritas, perbaikan ini akan mendukung dan menunjang pelaksanaan Rencana Induk.

Pada tahun 1971 lembaga-lembaga Internasional, baik PBB maupun Bank Dunia menilai program ini sangat positif. Saat itu muncullah bantuan teknologi untuk membiayai proyek *Urban Development Study* Jakarta yang digarap oleh PCD (*Planned Community Development*), diantaranya studi tentang program perbaikan kampung. Pelaksanaan Proyek Perbaikan Kampung akhirnya mendapat bantuan Bank Dunia. Pembiayaan Proyek MHT, 50% berasal dari bantuan Bank Dunia berupa pinjaman dan 50 % lagi berasal dari Pemda DKI Jakarta.¹⁰ Pinjaman dari Bank Dunia merupakan pinjaman negara yang dibayar oleh pemerintah pusat.

Perangkat pelaksanaan Program perbaikan kampung sebagai konsekuensi dari adanya kredit Bank Dunia tersebut mendorong adanya perubahan pada proses pelaksanaan proyek perbaikan kampung. Untuk pelaksanaan proyek, Gubernur DKI Jakarta saat itu membentuk unit khusus untuk menangani program perbaikan kampung yang disebut Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Muhammad Husni Thamrin (BAPPEM MHT).¹¹

B. Tinjauan Pustaka

Penulisan yang bertemakan Program Perbaikan Kampung: Proyek Muhammad Husni Thamrin di Jakarta 1969-1979 melengkapi penulisan karya ilmiah berupa Tesis yang berjudul “Pengaruh penambahan Penduduk terhadap Kualitas Hidup Studi Kasus Kampung-kampung yang Sudah Diperbaiki Melalui

¹⁰ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹¹ Gita Jaya. *Op. Cit.*, hlm. 260.

Proyek MHT Di Jakarta”. Tesis tersebut ditulis oleh Darrundono, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Dalam Disertasinya Darrundono juga menulis tentang “Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung, Studi Kasus : Proyek Muhammad Huni Thamrin di Jakarta”.

Penelitian yang dilakukan oleh Darundono mengambil studi kasus proyek MHT, tetapi lebih menitikberatkan pada masalah pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kualitas hidup sebagai faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya proyek MHT serta peran modal sosial dalam proyek perbaikan kampung. Oleh sebab itulah penulis mengambil tema tentang “Proyek Mohammad Husni Thamrin : Program Perbaikan Kampung di Jakarta Tahun 1969—1979” yang didalamnya membahas tentang pelaksanaan Proyek MHT secara menyeluruh.

C. Perumusan Masalah

Pokok-pokok masalah dalam penelitian adalah pada bagaimana proses pelaksanaan Proyek Mohammad Husni Thamrin di DKI Jakarta. Untuk membahas pokok permasalahan tersebut, peneliti telah membuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana masalah urbanisasi mengakibatkan timbulnya pemukiman padat penduduk di Jakarta 1960-1970?
2. Bagaimana proses Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung (Proyek Mohammad Husni Thamrin), sebagai Solusi untuk menjadikan Kampung di Jakarta semakin layak serta manfaatnya bagi masyarakat kampung?
3. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Proyek MHT?

D. Ruang Lingkup Masalah

Dalam penelitian ini, penulis mengambil ruang lingkup masalah pada periode 1969-1979, tahun 1969-1974 adalah awal mula dicetuskan Program Perbaikan Kampung oleh Gubernur Ali Sadikin. Sedangkan pada tahun 1974-1979 adalah pelaksanaan Proyek MHT Pelita II. Dimana pada Pelita II Program ini mendapat pandangan positif dari Dunia Internasional serta pinjaman dari Bank Dunia. Dengan adanya bantuan dari Bank Dunia, program yang awalnya direncanakan selesai pada Pelita III yaitu tahun 1983 dapat dipercepat penyelesaiannya menjadi dua Pelita yaitu tahun 1979. Penelitian ini juga dikhususkan di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang dimana Kebijakan pemerintah DKI dalam pelaksanaan Program Perbaikan Kampung ditujukan untuk menanggulangi keadaan kampung-kampung di Jakarta yang serba padat dengan kondisi lingkungan yang buruk.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang pelaksanaan Program Perbaikan Kampung serta tanggapan masyarakat Jakarta terhadap Proyek MHT. Juga dimaksudkan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Proyek MHT tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis ingin sedikit memberi gambaran tentang kinerja pemerintah DKI Jakarta dalam membangun daerahnya melalui Program Perbaikan Kampung. hal tersebut dilatarbelakangi keadaan Jakarta yang sangat buruk saat itu.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah. Dimana metode ini dibagi menjadi empat tahapan. Pertama, metode yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan kearsipan (heuristik). Dimana heuristik sejarah tidak berbeda dengan hakekatnya dengan kegiatan bibliografis yang lain sejauh menyangkut buku-buku yang tercetak.¹² Berhubung penelitian ini tergolong sejarah kontemporer, maka dalam penelitian ini, peneliti mencoba menggunakan metode wawancara. Kedua, melakukan kritik sejarah atau pengujian data dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder dengan kata lain mengadakan kritik ekstern dan intern terhadap sumber-sumber sejarah. Dalam kritik ekstern penulis mencoba membuktikan bahwa sumber-sumber yang di dapat otentik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber berupa jurnal-jurnal sejaman yang membahas tentang Proyek MHT secara bertahap, seperti Poskota, Berita Yuda, Sinar Harapan. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber arsip, seperti surat keputusan Gubernur tentang Proyek Perbaikan Kampung sebagai Proyek Muhammad Husni Thamrin, laporan peninjauan dari rombongan *Economic Development Institute* Bank Dunia mengenai Perbaikan Kampung.

Selain melakukan kritik ekstern, penulis juga akan melakukan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas dari sumber-sumber yang ada. Menurut saya

¹² Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI-Press, 1985, hal. 35.

sumber-sumber yang penulis dapatkan kredibilitasnya dapat di percaya. Namun tidak dapat dipungkiri juga, bahwa dalam penulisan sumber-sumber ini tingkat subjektivitas masih dapat dilihat dari para penulis. contohnya, karya Ramadhan K. H yang berjudul “Bang Ali Demi Jakarta 1966-1979” yang ditulis berdasarkan wawancara langsung dengan Ali Sadikin. Dimana gambaran kehebatan Ali Sadikin dan kelebihan-kelebihannya sebagai Gubernur lebih di tonjolkan.

Tahap ketiga ialah interpretasi, yaitu memberikan penafsiran terhadap data dan fakta dalam sumber-sumber tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penulis menggunakan konsep-konsep dari disiplin ilmu lain sosiologo, ilmu politik dan ilmu lingkungan.

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah historiografi atau penulisan sejarah. Fakta-fakta sejarah yang penulis temukan di seleksi, disusun, diberi tekanan, dan ditempatkan dalam suatu urutan kronologis yang sistematis. Penulis menyeleksi dan memberi tekanan pada fakta-fakta yang bisa memberikan gambaran mengenai sumber-sumber yang terkait dengan Proses Pelaksanaan Perbaikan kampung di Jakarta tahun 1969-1979.

G. Sumber Sejarah

penelitian ini bertitik tolak kepada dua jenis sumber penting, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat melalui penyelusuran dokumen-dokumen penting berupa Arsip yang berhubungan dengan tema, sumber primer tersebut pada umumnya diperoleh dari Arsip pemerintah DKI Jakarta (Arsip Jayakarta), yang bertempat di jalan raya Cikini Raya Taman Ismail

Marzuki. Sumber tersebut berupa *Pola Operasiaonal Perbaikan Kampung*, Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Mohammad Husni Thamrin (Bappem M.H.T). *Pokok-pokok Pikiran Program Perbaikan Kampung Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Rencana Induk Kota Jakarta 1985-2005*. Jakarta, Bappem M.H.T. *Laporan Peninjauan dari Rombongan Economic Development Institute Bank dunia Mengenai Perbaikan Kampung (Proyek Mohammad Husni Thamrin di Jakarta)*. Jakarta, Bappem, 1976.

Selain itu sumber primer berupa Artikel majalah sejaman yang di dalamnya memuat tentang Pelaksanaan program Perbaikan Kampung di antaranya ialah Widyapura, Januari 1977. "Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung". Prisma, 5 Oktober 1973. "Hasil Survey Kampung-kampung DKI Jakarta yang Terkena Proyek M.H. Thamrin", diperoleh dari perpustakaan LIPI di Jalan Gatot Subroto. Sumber primer berupa surat kabar seperti, Poskota. Kamis, 10 Januari 1976. "*Kampung-kampung di Jaksel Akan Dapat MHT*", Poskota. Selasa, 1 Februari 1977. "*Tiga Kel di Tg. Priok Dapat Proyek MHT*", didapat dari perpustakaan Nasional di Salemba Jakarta Pusat.

Adapun sumber-sumber tertulis lainnya lebih banyak dalam sumber sekunder. Sumber ini terdiri dari tulisan-tulisan yang menyangkut dengan sejarah Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Sehingga dapat melengkapi sumber bagi penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang berjudul Program Perbaikan Kampung (Proyek MHT) di Jakarta Tahun 1969—1979 diuraikan dalam beberapa bab. Bab pertama merupakan Pendahuluan, di dalamnya terdapat latar belakang, pokok masalah serta sistematika penulisan.

Pada bab dua menguraikan tentang Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin tahun 1966-1977. Didalamnya menjelaskan tentang pemerintahan pada masa Gubernur Ali Sadikin, kebijakan Ali Sadikin dalam pembangunan Kota Jakarta serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan fisik kota Jakarta, selain itu dijelaskan juga tentang masalah Urbanisasi yang mengakibatkan timbulnya pemukiman padat penduduk di Jakarta 1960-1970.

Pada bab tiga menjelaskan tentang proses pelaksanaan Program Perbaikan Kampung: Proyek Mohammad Husni Thamrin di Jakarta 1969-1979. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang kriteria-kriteria kampung yang akan di perbaiki serta mobilisasi dana untuk Proyek MHT. Dijelaskan juga tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Proyek MHT.

Pada bab empat menjelaskan tentang Kondisi kampung setelah perbaikan Proyek MHT 1968-1979 di Jakarta. Pada bab ini didalamnya juga menjelaskan tentang permasalahan yang ada pada kampung-kampung yang sudah diperbaiki serta bagaimana peran serta masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana yang telah diperbaiki.

BAB II

Jakarta Pada Masa Pemerintahan Gubernur Ali Sadikin 1966—1977

Kota Jakarta pertama kali dibentuk oleh Belanda pada tanggal 18 Agustus 1602 dengan nama “Kabupaten Kota Batavia” (*Regentschap Stad Batavia*) dengan sistim berpusat. Adapun dengan lembaga pemerintahan daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dibentuk tahun 1905, yang kemudian disempurnakan dengan ketentuan perundang-undangan berturut-turut pada tahun 1906 dan 1940. maka sejak tahun 1905, terbentuklah “Pemerintahan *Stad Batavia*”, kemudian di ganti dengan “*Gemeente Batavia*” dan akhirnya menjadi “*Stadsgemeente Batavia*”.²⁶

Pada tahun 1930, Gubernur Jenderal Van Den Bosch membentuk lingkaran yang disebut “Garis pertahanan Van Den Bosch” yang disebut *Weltevreden*, yakni Gambir. Di sinilah tempat Pusat pemerintahan Kolonial Belanda. Pusat ini kemudian menjadi poros lingkaran konsentris perkembangan wilayah Jakarta yang dikenal dengan sebutan daerah Menteng, Gondangdia, Menteng Pulo, Gunung Sahari dan lingkaran Kemayoran Bahkan juga sampai Jatinegara.²⁷

²⁶ Gita Jaya. *Op. Cit*, hlm. 13.

²⁷ The Liang Gie. *Sejarah Pemerintahan Kota Jakarta*. Jakarta, Kotapraja Jakarta Raya, 1958. hlm. 32.

Pada masa pendudukan Jepang, kota Jakarta dirubah dari tata pemerintahan yang tadinya hanya merupakan badan pengurus rumah tangga saja, menjadi pemerintahan kota yang menyelenggarakan segala urusan pemerintah dalam lingkungan daerahnya. Di sinilah berlaku sistem pemerintahan tunggal dengan hanya dibantu oleh beberapa *zyeyaku* (wakil Kepala) tanpa adanya dewan. Pemerintahan kota Jakarta pada waktu itu disebut “*Jakarta Tokubetsushi*”.²⁸ Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, istilah ‘*Jakarta Tokubetsushi*’ diganti dengan ‘Pemerintahan Nasional Kota Jakarta’. Pada tanggal 29 september 1945 Soewiryo diangkat sebagai Walikota Jakarta.²⁹ Pemerintahan daerah yang bercorak nasional ini tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun, karena adanya agresi militer pertama oleh pihak Belanda pada bulan Juli 1947 yang didudukinya wilayah Republik Indonesia, termasuk kota Jakarta, sehingga pemerintahan kota Jakarta tidak dapat bertahan lagi, saat itu juga pemerintahan bersama para pejabat RI telah lebih dulu pindah ke Yogyakarta.³⁰

Setelah menduduki kota Jakarta, Belanda membentuk pemerintahan Pra-Federal pada tanggal 9 Maret 1948 dan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Wilayah Jakarta diperluas ke arah sekitarnya. Pada tanggal 11 Agustus 1948, wilayah pemerintahan kota (*Stadsgemeente Batavia*) beserta wilayah-wilayah sekitarnya merupakan distrik-distrik dari kabupaten (*Regenschap*) Batavia.

²⁸ Gita Jaya, *Op.Cit.*, hlm. 15.

²⁹ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, 30. tidak diterbitkan.

³⁰ G.A. Warmansyah., dkk. *Sejarah Revolusi fisik Daerah DKI Jakarta*. Jakarta : Eka Darma, 1977. hlm. 8.

Setelah kedaulatan kembali ke tangan Republik Indonesia, kota Jakarta dijadikan Ibukota Republik Indonesia Serikat, tepatnya pada bulan Desember 1949. Dengan Keputusan Presiden tahun 1950 No. 125, maka kota Jakarta dijadikan daerah swatantra, yang disebut kota praja. Pada tanggal 31 Maret 1950, Soewiryo diangkat kembali sebagai Walikota Jakarta Raya.³¹

Setelah dua puluh tahun merdeka, kota Jakarta mengalami beberapa kali perubahan di dalam administrasi pemerintahannya. Beberapa hal penting yaitu perubahan status kota praja menjadi daerah tingkat I sejak tanggal 15 Januari 1960, dan kepala daerahnya disebut gubernur, berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dicabutnya UU No. 1 tahun 1957 dan diberlakukannya UU No. 18 tahun 1965 menyebabkan timbulnya tiga klasifikasi kota, yakni 'kota raya' sebagai daerah tingkat satu, 'kota madya' sebagai daerah tingkat dua, dan 'kota praja' sebagai daerah tingkat tiga. seperti yang dimaksudkan oleh UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah. Walikota langsung dibawah gubernur kepala daerah, camat di bawah walikota, sedangkan lurah dibawah camat dalam hubungan vertikal.³²

Nama-nama kepala daerah yang telah memimpin kota Jakarta, di antaranya, yaitu walikota pertama setelah proklamasi kemerdekaan dijabat oleh Soewiryo dari tanggal 29 September 1945 sampai dengan 21 Juli 1947, dan kemudian menjabat kembali pada tanggal 30 Maret 1950 sampai dengan 2 Mei 1951. walikota yang kedua adalah Sjamsuridjal dari 27 Juni 1951 sampai dengan 1 November 1953 hingga 25 Februari 1958 untuk pertama kalinya, kemudian

³¹ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm.31.

³² *Ibid.*, hlm. 32.

Soediro diangkat kembali sebagai kepala daerah tingkat I kota praja Jakarta Raya sejak tanggal 25 Februari 1958 sampai dengan 6 Februari 1960.

Jakarta setelah kepemimpinan Soediro tidak lagi diperintah oleh seorang walikota, tetapi oleh seorang gubernur. Selanjutnya Soemarno diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang keempat pada tanggal 4 Februari 1961 dan masa Jabatannya berakhir pada tanggal 26 Agustus 1964 kemudian ia digantikan oleh Henk Ngantung sebagai Gubernur kepala daerah kelima, masa jabatannya cukup singkat, yakni dari tanggal 27 Agustus 1964 sampai dengan 5 Juli 1965. setelah itu Soemarno menjabat kembali menggantikan Henk Gantung untuk yang kedua kalinya dari tanggal 15 Juli 1965 sampai dengan 23 Maret 1966. Gubernur Jakarta terakhir masa pemerintahan Presiden Soekarno adalah Ali Sadikin yang menjabat dari tanggal 28 April 1966 sampai 5 Juli 1977.³³

A. Situasi dan Kondisi Kota Jakarta

Kawasan administratif kota Jakarta terletak pada $94^{\circ} 45' / 94^{\circ} 05'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 68' / 11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Jakarta. Keseluruhan wilayah Jakarta terletak di dataran rendah Pantai Utara bagian Barat Pulau Jawa. Wilayah Jakarta bermuara sekitar 10 buah sungai alam dan buatan. Luas kota Jakarta pada awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin 1969 adalah 577 km², pada tahun 1977 sebagai akhir jabatannya luas kota Jakarta menjadi 637,44 km². Ini berarti selama kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin, Jakarta mengalami penambahan luas wilayah lebih kurang 60 km². Hal ini disebabkan proses

³³ *Ibid.*, hlm. 33-34.

perkembangan wilayah Jabotabek yang akhirnya masuk ke dalam wilayah administratif DKI Jakarta pada tanggal 24 Juli 1975 (lihat peta perubahan wilayah DKI Jakarta pada lampiran 1 dan 2).³⁴

Tinggi tanah di wilayah selatan kota Jakarta mencapai kurang lebih 50 m di atas permukaan laut, sedangkan sebagian besar wilayah utara kota Jakarta diliputi rawa-rawa. Wilayah bagian utara dibatasi lebih kurang 7 m di atas permukaan laut. Pada lokasi tertentu justru letaknya berada di bawah permukaan laut. Wilayah Selatan Banjir Kanal relatif berbukit-bukit dibandingkan dengan keadaan di wilayah utara. Oleh karena itu wilayah Jakarta Selatan sampai dengan Banjir Kanal keadaan tanahnya agak curam, sedangkan dari Banjir Kanal ke arah laut, keadaan tanahnya hampir rata.

Sebelah utara kota Jakarta dibatasi laut Jawa, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah barat dengan kali Angke. Melihat keadaan geografis Jakarta, maka beberapa peruntukan tanah dirancang oleh pemerintah DKI Jakarta pada masa Gubernur Ali Sadikin berdasarkan hal tersebut. Jakarta Utara diperuntukan sebagai daerah pelabuhan laut dan usaha perikanan, wilayah selatan diperuntukan untuk wilayah perkebunan buah-buahan dan sayur-mayur, sedangkan wilayah timur Jakarta diperuntukan sebagai kawasan industri.

Pada tahun 1961 tercatat penduduk Jakarta berjumlah 2.907.000 jiwa, jumlah penduduk meningkat menjadi 4.546.492 jiwa. Hal ini berarti antara tahun 1961-1971 jumlah penduduk Jakarta berkembang rata-rata 5,8% pertahun, 2,5% berasal dari penambahan penduduk secara alamiah, dan 3,3% berasal dari arus

³⁴ Gita Jaya. *Op. Cit.*, hlm. 22.

Urbanisasi.³⁵ Hal tersebut membuat sulit Pemerintah DKI Jakarta pada masa Ali Sadikin dalam memecahkan masalah seperti laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan kekurangan fasilitas kota untuk kebutuhan masyarakat Jakarta, seperti kebutuhan akan perumahan, air bersih, listrik, transportasi sekolah, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Maka Gubernur Ali Sadikin akhirnya menetapkan kota Jakarta sebagai kota 'tertutup' untuk pendatang yang ingin berurbanisasi dengan mengadakan tertib administrasi lewat pemeriksaan kartu tanda penduduk.³⁶

Pada tahun 1969-1980, wilayah Jakarta pusat mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah penduduk mencapai 1.290.451 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 20.316 jiwa per km², sehingga wajar program perbaikan kampung yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1969 dimulai dari pusat kota Jakarta. Kepadatan penduduk menimbulkan kampung-kampung kumuh di perkotaan, yakni ada sekitar 60% penduduk Jakarta hidup di wilayah perkampungan dengan kualitas hidup masyarakatnya yang sangat memprihatinkan serta lingkungan hidupnya yang tidak sehat. Kondisi ini menantang Gubernur Ali Sadikin untuk membenahi dan menjadikan program perbaikan kampung yang dikenal dengan nama Proyek Muhammad Husni Thamrin (Proyek MHT) menjadi salah satu prioritas utama, sesuai dengan visi dan misi pembangunannya, yakni menjadikan Jakarta sebagai kota yang representatif.

Sebagai pintu gerbang utama, Jakarta merupakan titik pertemuan pengaruh sosial, politik maupun budaya dari negara lain. Kota ini merupakan tempat percampuran, pembauran maupun benturan pengaruh tersebut. Sejalan dengan itu

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

³⁶ Edy Sedyawati, dkk. *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980*. Jakarta : Depdikbud, 1987, hlm. 5.

penduduk Jakarta juga sangat heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, agama, bahasa, dan lainnya.

B. Jakarta Masa Gubernur Ali Sadikin 1966-1977

B. 1. Pengangkatan Ali Sadikin Sebagai Gubernur DKI Jakarta

Ali Sadikin diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 28 April 1966, ia pilih secara langsung oleh Presiden Soekarno. Sebelumnya Ali Sadikin menjabat sebagai kepala bagian Staf Operasi Korps Marinir Pangkalan IV di Tegal tahun 1945, kemudian menjadi Kepala Bagian Perencanaan Korps Armada IV dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1950. selain itu ia juga menjabat Kepala Korps Marinir pada Akademi Angkatan Laut pada Tahun 1950-1954. pada tahun 1954 sampai dengan tahun 1959, ia diangkat sebagai Kepala Pusat Pendidikan Marinir sekaligus sebagai Komandan Induk Pasukan Korps Marinir. Di tahun 1959 sampai dengan tahun 1963, ia menjadi wakil II dari Menteri/Panglima Angkatan Laut. Setelah itu, ia menjabat Menteri Perhubungan Laut sekaligus Menteri Koordinator dalam urusan-urusan Maritim pada tahun 1963-1966. sampai pada akhirnya ia dipilih sebagai Gubernur DKI Jakarta Periode 1966-1977.³⁷

Presiden Soekarno mengangkat Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta berdasarkan beberapa alasan. Pertama, karena Jakarta adalah kota Pelabuhan, Soekarno beranggapan bahwa sangat tepat memilih seorang Gubernur yang akan memimpin pemerintahan DKI Jakarta dari Angkatan Laut. Kedua, dipilihnya Ali Sadikin sebagai Gubernur karena Soekarno yakin Ali Sadikin akan dapat

³⁷ Ramadhan K.H. *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993. hlm. 19.

menghadapi Diplomatic Corps, dibantu oleh istrinya, Nani yang berprofesi sebagai Dokter gigi, dianggap Soekarno dapat melayani Diplomatic Corps. Dalam acara pelantikan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara Jakarta, tanggal 28 April 1966, di bawah ini adalah cuplikan kalimat yang diucapkan Presiden Soekarno, sebagai berikut :³⁸

“Jakarta ini saudara-saudara, adalah pusat daripada pemerintahan. Disini terkumpul semua diplomaten, Duta-duta Besar, Duta-duta Charge d’ Affaires – charge d’Affaires. Saya minta supaya Gubernur kota Jakarta bisa menghadapi bahkan meladeni diplomatic corps disini. Saya cari-cari orang, wah baiknya ini Ali Sadikin. Apalagi Ali Sadikin mempunyai istri yang bisa meladeni, menghadapi diplomatic corps. Karena itu merupakan salah satu sebab pemilihanku kepada pelaut Ali Sadikin ialah, inilah, engkau harus bisa meladeni diplomatic corps dengan bantuan istrimu yang aku yakin pandai juga meladeni diplomatic corps.”

Menurut Sumber lain, dipilihnya Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta yang berasal dari Angkatan Laut, dilatarbelakangi karena setelah adanya peristiwa G 30 S/PKI, dimana Angkatan Laut tetap loyal pada presiden Soekarno.³⁹

B. 2. Kebijakan Ali Sadikin dalam Pembangunan Kota Jakarta

Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin dilatarbelakangi oleh pemikiran-pemikiran Presiden Soekarno, untuk menjadikan kota Jakarta yang representatif sebagai Ibu kota negara yang dapat sejajar dengan Hongkong, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, dan Singapura.⁴⁰ Alasan lain yang dipakai Gubernur Ali Sadikin di dalam meletakkan dasar pembangunan, dimana ia melihat masyarakat Jakarta khususnya, dan Indonesia pada umumnya dari corak

³⁸ Ali Sadikin. *Mengusur dan Membangun*. Yayasan Idayu. Jakarta, 1977. hlm. 27.

³⁹ Susan Abeyasekere. *Jakarta a History*. Oxford University Press, Oxford, 1989. hlm. 215.

⁴⁰ Susan Abeyasekere. *Ibid.*, hlm. 12.

budaya dan sejarah perkembangannya yang cenderung melihat Jakarta sebagai ukuran untuk perubahan nilai.

Kekuatan objektif, menyebabkan Jakarta tidak dapat menghindarkan diri dari peranannya sebagai pelopor pembaharuan (Agent of change). Hal ini yang menjadi dasar falsafah selama sebelas tahun menjalankan pemerintahan DKI Jakarta. Perubahan Struktur organisasi pemerintah DKI Jakarta pada masa Ali Sadikin telah memberi kesempatan Ali Sadikin sebagai gubernur kepala daerah, menjadi penguasa tunggal eksekutif daerah dan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai dengan walikota berada langsung di bawah pimpinan Gubernur Ali Sadikin.

Ali Sadikin memanfaatkan kedudukan Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dengan mengembangkan sumber pembiayaan, baik dari pendapatan sendiri maupun subsidi dari pemerintah pusat. Dalam usahanya membangun Jakarta, Ali Sadikin melibatkan instansi-instansi yang bergerak di bidang keamanan. Ali Sadikin membutuhkan Angkatan bersenjata untuk membangun Jakarta, di mana di setiap usaha pembangunan sering kali berbenturan dengan nilai, budaya, adat istiadat.

Dengan menggunakan rencana induk Jakarta 1965-1985 sebagai arah pembangunan Jakarta yang menggambarkan 20 tahun mendatang, dapat terlihat keinginan Ali Sadikin untuk menjadikan Jakarta kota yang representatif sebagai ibu kota. Dalam Master Plan, terdapat gambaran Ibu Kota negara Republik Indonesia yang ideal sebagai kota pusat pemerintahan, pusat perdagangan,

kebudayaan, pariwisata serta industri, dan jasa. Jakarta harus dapat menempatkan diri sebagai Ibu kota negara dan kota internasional.

Di dalam rencana induk juga terdapat beberapa masalah kota, seperti ancaman banjir, kemacetan lalu lintas, pemakaman, dan fasilitas kota lainnya, serta masalah kebersihan kota, masalah tanah, air minum, sampah, dan masalah angkutan umum yang harus segera dipecahkan.

B. 3. Problema Jakarta di Awal Pemerintahan Ali Sadikin

Keadaan Jakarta pada masa awal pemerintahan Gubernur Ali Sadikin 1966 diwarnai oleh situasi politik yang memanas. Telah terjadi suatu peristiwa yang membawa suatu perubahan dalam pemerintahan Republik Indonesia, peristiwa ini disebut G 30 S/PKI. Keadaan ini mengakibatkan kondisi sosial, ekonomi masyarakat memperhatikan. Hal ini juga mengakibatkan inflasi yang tinggi serta naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok sehingga Jakarta pada saat itu berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan pembangunan.⁴¹

Di samping kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kritis dan tidak stabil, Jakarta juga dihadapkan pada ketidakseimbangan antara perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan hidup masyarakat. Jakarta merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akibat arus urbanisasi yang semakin meningkat. Sebelum Perang Dunia II, pemerintah hindia Belanda telah merencanakan kota Jakarta hanya dapat menampung 600.000 jiwa penduduk,

⁴¹ Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. hlm. 444.

namun setelah Perang Dunia II berakhir, terjadi kenaikan jumlah penduduk akibat arus urbanisasi menjadi 3 juta jiwa pada tahun 1961.⁴²

B. 4. Program Pengembangan Fisik Kota Jakarta Masa Ali Sadikin

Kebijakan Ali Sadikin dalam pengembangan fisik kota dilatarbelakangi oleh ketidakseimbangan antara tingkat perkembangan fisik sarana kota dengan kebutuhan penduduknya. Hal lain yang menjadi faktor ialah kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Kota Jakarta yang semula direncanakan oleh pemerintah Belanda sebelum perang hanya untuk menampung 600.000 penduduk, pada tahun 1961 telah berpenduduk 3 juta jiwa. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah penduduk memaksa pemerintah untuk meningkatkan secara kualitatif sarana bagi keluarga dan melakukan penataan kembali struktur kota secara kualitatif.⁴³ Kenaikan penduduk tersebut sebagian besar disebabkan karena pendatang dari daerah-daerah di luar Jakarta. Sebagian besar dari mereka ini justru terdiri dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan Ali Sadikin dalam pengembangan fisik kota didukung juga oleh rencana induk yang sudah ada sebelumnya. Pada hakikatnya rencana induk juga mengatur tentang penggunaan tanah, meliputi kegunaan untuk rumah tinggal, perindustrian, tempat-tempat rekreasi, jalur-jalur komunikasi dan lain sebagainya. Rencana induk juga memproyeksikan rencana perwujudan secara tiga dimensi yang diatur menurut kepadatan di setiap wilayah atau bagian kota.

⁴² Ratu Husmiati. *Op.,cit*, hlm. 30. Tesis tidak diterbitkan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 31.

Keadaan prasarana kota pada awal masa Pemerintahan Ali Sadikin dapat dianggap kritis karena kurang terawat. Keadaan itu tidak saja mengurangi kemampuan pelayanan sarana-sarana tersebut, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan pada kemampuan pemerintah dalam membangun kota. Sementara itu intensitas dan gairah pembangunan akibat membaiknya iklim perekonomian secara menyeluruh di Indonesia sangat terasa pengaruhnya di Jakarta. Khususnya volume pembangunan dengan pembiayaan pemerintah sangat meningkat sejak pemerintah orde baru. Berkaitan dengan keadaan tersebut pemerintah telah membuat beberapa dinas baru yang merupakan pemecahan dari Dinas Pekerjaan Umum sejak tahun permulaan jabatan Ali Sadikin sebagai Gubernur, antara lain Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota.

B. 5. Masalah Dan Faktor-faktor Dalam Pengembangan Fisik Kota Jakarta

Dalam usaha pengembangan fisik kota Jakarta, terdapat masalah-masalah yang sangat berpengaruh di antaranya ialah masalah pengendalian tanah untuk pembangunan. Salah satu akibat langsung yang harus ditanggung oleh laju pembangunan itu akan terhisap oleh pembiayaan pengadaan tanah. Karena itu, meskipun secara nasional pengaturan pengendalian tanah perkotaan ini belum ada, pemerintah saat itu memberanikan diri untuk mengambil langkah-langkah ke arah tersebut. Pemerintah saat itu membatasi pengeluaran hak-hak milik baru dan penetapan harga-harga tanah untuk kepentingan umum.

Sejak ditetapkannya rencana induk DKI Jakarta 1965-1985, fungsi tiap bidang tanah dalam wilayah kota Jakarta telah ditetapkan dan diarahkan untuk menciptakan tujuan pengembangan kota. Kebijakan itu meliputi prinsip bahwa penggunaan tanah harus diarahkan sebagai kebijakan lingkungan peruntukan (*zoning*) dan perpetakan (*kaveling*) sebagaimana ditetapkan dalam rencana kota. Dalam rangka penerbitan tata guna tanah, telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum. Karena intensitas pembangunan fisik di Jakarta ternyata meningkat dengan pesat, maka untuk menjamin agar masalah ini dapat dipecahkan dan digarap secara seksama, pada tahun 1971 dibentuk Dinas Tata Kota. Dinas ini merupakan pengembangan bagian tata kota dari Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan tanah, dengan tugas pokok yaitu Mengadakan pengawasan dan penerbitan teknis, yuridis administrasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kegunaan persil-persil tanah dan Menyiapkan izin penunjukan penggunaan tanah untuk *Real Estate*.⁴⁴

Apabila terjadi penggunaan tanah oleh anggota masyarakat yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, pemerintah saat itu menetapkan kebijakan penyelesaian sebagai berikut, jika peruntukan baru menurut rencana induk belum dilaksanakan maka penduduk masih dapat menempati seperti semula. Selanjutnya apabila rencana peruntukannya sudah dilaksanakan, pemilik yang sah harus menyesuaikan dengan ketentuan peruntukan baru tersebut. Bagi penghuni liar, pembebasan atas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dengan

⁴⁴ Gita Jaya. *Op.cit.*, hlm. 227.

memberikan sekedar uang pesangon, ditransmigrasikan atau dipulangkan ke daerah asal.⁴⁵

Faktor lain yang sangat mendukung dalam pengembangan fisik kota Jakarta ialah pembangunan sarana jalan dan jembatan, faktor ini menjadi utama karena memegang peranan dalam menentukan kegiatan-kegiatan di sekitarnya, baik yang bersifat kegiatan ekonomi, pemerintahan, kebudayaan dan sebagainya. Dengan demikian peranan jalan tidak hanya perlu ditinjau dari kepentingan pada satu saat saja tetapi juga perlu ditinjau secara menyeluruh dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan atau program-program lainnya.

Pada tahun 1966, jalan-jalan di Jakarta masih sangat sempit dan sangat rusak karena rendahnya kualitas dan kurangnya pemeliharaan. Di samping itu panjang jalan yang ada tidak lagi dapat menampung lalu lintas kendaraan. Panjang jalan hanya dapat meliputi kurang lebih 800 km, sedangkan jumlah kendaraan pada tahun itu telah mencapai dari 160.000 buah.⁴⁶ Masalah ini juga dipersulit oleh masalah air tanah serta bahaya banjir yang selalu melanda Jakarta, telah banyak merusak jalan-jalan yang telah dibuat. Karena itu harus dibuat jalan-jalan yang mempunyai kualitas yang khusus - tahan terhadap gangguan air tanah dan banjir – hal ini membuat harga jalan menjadi sangat tinggi, sehingga menyerap sangat banyak dari anggaran yang terbatas.

Dalam Rangka perbaikan dan normalisasi jalan, jalan-jalan ibu kota dibedakan menurut fungsinya yaitu: Jalan ekonomi, jalan lingkungan dan jalan desa. Pada masa Ali Sadikin telah dilaksanakan rehabilitasi jalan ekonomi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 228.

⁴⁶ Ramadhan K.H. *Op.cit.*, hlm. 98.

sepanjang 317 Km, peningkatan mutu jalan dan normalisasi jalan ekonomi sepanjang 200 Km dan pembuatan jalan ekonomi yang baru sepanjang 3.500 M. Sedangkan untuk jalan lingkungan telah diperbaiki sepanjang 635 Km dan pembuatan serta perbaikan jembatan beton sebanyak 93 buah.⁴⁷

Kebijakan dalam pengembangan fisik serta perbaikan kota Jakarta pada masa Ali Sadikin adalah termasuk pada kebijakan mengenai Program Perbaikan Kampung. Hal yang melatarbelakangi program tersebut ialah karena adanya tekanan penduduk yang pesat akibat arus urbanisasi, yang mengakibatkan lingkungan-lingkungan hidup yang telah ada menjadi semakin padat dan tumbuh tidak teratur, bahkan mengakibatkan tumbuhnya lingkungan hidup yang baru dan tidak sesuai dengan planologi, sedangkan lingkungan baru tersebut dibuat dengan tidak mengindahkan persyaratan-persyaratan kesehatan maupun keselamatan. Kondisi seperti ini yang menyebabkan Keadaan sosial ekonomi masyarakat kampung di Jakarta sangat jauh dari kualitas yang wajar.

Hal lain yang mendasari dilaksanakannya program perbaikan kampung ini, diantaranya karena 60% penduduk Jakarta masih bermukim di kampung dengan lingkungan hidup yang makin buruk, sehingga kehidupan mereka semakin tidak sehat, apatis dan kurang produktif.⁴⁸ Selain itu masalah pemukiman yang layak bagi penduduk menjadi semakin mendesak, sebagai akibat pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif cepat. Ditambah lagi karena Jakarta dituntut oleh

⁴⁷ Edy Sedyawati. *Op. Cit.*, hlm. 109.

⁴⁸ Badan Pelaksanaan Pembangunan (Bappem) Proyek Mohammad Husni Thamrin. *Laporan Peninjauan dari Rombongan Economic Development Institute Bank dunia Mengenai Perbaikan Kampung (Proyek Mohammad Husni Thamrin di Jakarta)*. Jakarta, Bappem, 1976. hlm. 26.

pemerintah DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Ali Sadikin untuk menjadi ibu kota ideal dan kota metropolitan.

Proyek yang dimulai pada tahun 1969, bertujuan untuk memperbaiki keadaan lingkungan hidup masyarakat yang berpenghasilan rendah, menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas dan gairah hidup masyarakat Jakarta, membangun perkampungan dengan perencanaan yang terarah, sehingga memudahkan dilakukan penataan lebih lanjut. Pada tahun 1973 Program Perbaikan Kampung diubah namanya menjadi Proyek Muhammad Husni Thamrin atau lebih dikenal dengan Proyek MHT. Dipakai nama Muhammad Husni Thamrin adalah untuk mengenang jasanya yang memperjuangkan nasib rakyat kecil Betawi di masa pemerintahan Belanda.⁴⁹

C. Urbanisasi Mengakibatkan Timbulnya Pemukiman Padat Penduduk di Jakarta 1960-1970

Sejak akhir tahun 50-an, Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, terutama disebabkan oleh arus urbanisasi. Pertumbuhan ini berlanjut oleh sebab yang sama, sebagai akibat dari beberapa hal, seperti keamanan daerah-daerah, kembalinya Ibu kota negara ke Jakarta, dan kesempatan kerja yang lebih banyak di Jakarta, berkembangnya kota Jakarta sebagai pusat perdagangan, pusat industri, dan sebagai pusat-pusat lainnya.

Pada tahun 1950, penduduk Jakarta berjumlah 1.600.000 jiwa dan pada tahun 1960 jumlah tersebut telah mencapai 2.900.000 jiwa, angka ini berkembang terus sampai mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada akhir tahun 60-an. Dengan

⁴⁹ Ramadhan K. H. *Op. Cit.* Hlm. 168.

pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus, tanpa penambahan fasilitas dan prasarana yang memadai, termasuk salah satu kebutuhan utama penduduk, yaitu papan (tempat tinggal), mendorong masyarakat yang datang ke Jakarta memadati daerah perkampungan yang sebelumnya sudah padat. Hal ini yang setiap tahunnya menjadi permasalahan di kota Jakarta. Mengenai pertumbuhan penduduk di Jakarta dapat dilihat dalam tabel berikut.⁵⁰

Tabel 1
Penduduk DKI Jakarta Pada Pertumbuhannya
Pada Tahun 1961, 1971 dan 1980
(Ribuan)

Wilayah	1961	1971	1980	Pertumbuhan (%)	
				1961-1971	1971-1980
Jakt. Selatan	1.156,4	1.050,5	1.519,8	--	4,58
Jakt. Timur	--	802,1	1.456,8	--	6,78
Jakt. Pusat	796,5	1.266,3	1.236,9	--	- 0,29
Jakt. Utara	953,6	612,4	976,0	--	5,25
Jakt. Barat	--	820,8	1.231,2	--	4,16
DKI Jakarta	2.906,5	4.546,5	6.480,7	4,62	3,97

Sumber: Prisma 5, Mei 1977

Arus urbanisasi ini sebagian sebagian besar dilakukan oleh masyarakat desa yang kondisi ekonominya sangat buruk karena pendapatan mereka yang rendah, tingkat pendidikan maksimal adalah tamatan sekolah dasar, mereka kebanyakan putus pendidikan di tengah jalan. Dalam menyambung hidup maka modal utama yang diandalkan adalah tenaga kasar mereka dan pada saat banyak waktu kosong mereka berusaha dan berkembang dalam sektor ekonomi yang tidak

⁵⁰ Masri Singarimbun. "Urbanisasi Apakah Itu Suatu Problema". *Prisma*, 5 Mei 1977, hlm. 6.

resmi. Mengenai daerah asal para pendatang dapat dikemukakan dalam tabel berikut.⁵¹

Tabel 2
Taksiran Penduduk Jakarta Berdasarkan
Sukubangsa Pada Tahun 1961

	Jumlah	Persen
<i>Pribumi</i>		
Jakarta Asli	655.400	22,9
Sunda	952.500	32,8
Jawa dan Madura	737.700	25,4
Aceh	5.200	0,2
Batak	28.900	1,0
Minangkabau	60.100	2,1
Kelompok Sumatra Selatan	34.900	1,2
Banjar	4.800	0,2
Kelompok Sulawesi Selatan	17.200	0,6
Kelompok Sulawesi Utara	21.000	0,7
Kelompok Maluku dan Irian	11.800	0,4
Kelompok Nusatenggara Timur	4.800	0,2
Kelompok Nusatenggara Barat	1.300	0,0
Bali	1.900	0,1
Melayu dan Kelompok lain luar Jawa	19.800	0,7
Tidak diketahui	38.600	1,3
<i>Non-pribumi</i>	294.000	10,1
Cina	16.500	0,6
Lain-lain		
Jumlah	2.906.500	100,00

Sumber : Prisma 5, Mei 1977

C. 1. Faktor Pendorong dan Faktor Penarik

Di negara-negara yang sedang berkembang proses urbanisasi biasanya dihubungkan dengan munculnya gubuk-gubuk liar, meningkatnya gelandangan, pelacuran serta akibat-akibat negatif lainnya. Namun apabila kita perhatikan proses urbanisasi juga membawa dampak positif, unsur-unsur dari urbanisasi

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 7.

tersebut terdiri dari berbagai ragam orang dengan berbagai ragam pula keterampilan atau kepribadian yang dimilikinya. Urbanisasi sendiri dapat dipakai sebagai pertanda akan adanya angin pembangunan.

Proses pembangunan yang berlangsung di kota Jakarta, hanya saja tidak diimbangi dengan pembangunan atau perbaikan keadaan kehidupan di daerah pedesaan atau pembangunan di kota-kota kecil lainnya. Kesulitan kehidupan di daerah pedesaan ditambah dengan cepatnya kenaikan jumlah penduduk, telah memaksa sebagian besar penduduk di daerah pedesaan untuk pergi ke kota-kota besar. Sebagai konsekuensi dari proses perpindahan, terjadilah ketidakseimbangan antara pembangunan dan perluasan fasilitas kota dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dengan pesatnya. Ketidakseimbangan inilah yang biasanya melahirkan masyarakat gelandangan di kota-kota besar.

Di bawah ini disebutkan beberapa faktor pendorong serta penarik masyarakat untuk migrasi ke Jakarta.

Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi :⁵²

A. Faktor pendorong

1. makin berkurangnya sumber-sumber alam, menurunnya permintaan atas barang-barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh seperti hasil hasil tambang, kayu atau bahan-bahan dari pertanian.
2. menyempitnya lapangan pekerjaan di tempat asal akibat masuknya teknologi yang menggunakan mesin-mesin.

⁵² Darrundono : *pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup: Studi Kasus Kampung-kampung yang Sudah Diperbaiki Melalui Proyek MHT di Jakarta*. Tesis Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Jakarta, 1988, hlm. 23. Tidak Diterbitkan

3. adanya tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, suku di daerah asal
4. tidak cocok lagi dengan adat/budaya/kepercayaan di tempat asal.
5. alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi.
6. bencana alam yang melanda baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau panjang atau adanya wabah penyakit.

B. Faktor Penarik

1. adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok.
2. kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik.
3. kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan misalnya iklim, perumahan, sekolah dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya.
5. rujukan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung.
6. adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan, pusat kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota kecil.
7. cepatnya pembangunan di Jakarta termasuk pembangunan industri, sekalipun tenaga yang diserap tidak sebanyak yang terdapat pada industri jasa.

Sebagai Ibukota, pusat pemerintahan dan perdagangan, Jakarta menunjukkan pembangunan yang cukup mengesankan. Dengan adanya pembangunan yang pesat maka pesat pulalah perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja inilah yang menjadi faktor utama masyarakat luar untuk migrasi ke Jakarta.

C. 2. Daya Tarik Kota Jakarta

Pembangunan dan pengembangan kota Jakarta telah dilakukan sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda, namun pembangunan lebih terasa di era 60-an. Ketika Ali Sadikin menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ia berusaha untuk membangun kota Jakarta menjadi sebuah kota besar yang dapat disejajarkan dengan kota-kota lainnya di dunia, khususnya kota-kota besar di Asia. Berbagai sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah kota besar, seperti ruas-ruas jalan untuk mendukung transportasi kota, gedung-gedung perkantoran dan perhotelan, gedung-gedung pemerintahan, sekolah-sekolah, pusat kesehatan maupun sarana olah raga dibangun oleh Ali Sadikin. Demikian pula tempat-tempat rekreasi seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Ragunan maupun Taman Ismail Marzuki.⁵³

Gemerlapnya kota Jakarta dengan kerlap kerlip lampu-lampu yang ada di jalan-jalan, perumahan dan pemukiman maupun gedung-gedung membuat masyarakat luar daerah tertantang untuk datang ke Jakarta. Aktivitas di Jakarta bukan hanya dimulai pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Restoran-

⁵³ Ramadhan K.H. *Op.cit.*, hlm. 438.

restoran, *night club*, tempat-tempat perjudian bahkan tempat prostitusi seperti Kramat Tunggak selalu ramai setiap saat, terlebih pada malam hari.⁵⁴ Tersedianya segala fasilitas yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalani kehidupan di Jakarta, membuat para migran (pendatang) tertarik untuk datang dan menetap di kota Jakarta.

C. 3. Masalah-masalah Serta Pemecahan Yang Timbul Akibat Urbanisasi

Salah satu masalah yang timbul sebagai akibat meningkatnya arus urbanisasi yang sangat cepat tahun 60-an adalah berupa kenyataan bahwa kota-kota di Indonesia pada tingkat sekarang ini belum cukup mampu untuk menampung pertumbuhan penduduk sepesat itu.⁵⁵ selain itu masalah pertumbuhan penduduk mengakibatkan tekanan-tekanan pada persediaan tempat tinggal yang tidak dapat segera terpenuhi, disebabkan kemampuan yang terbatas dari pemerintah saat itu. Daerah-daerah perumahan telah meluas ke daerah-daerah perbatasan di pinggir kota dan ke tempat-tempat di mana fasilitas-fasilitas prasarana tidak tersedia.

Besarnya penduduk yang bermigrasi ke Jakarta dan Pemda sendiri yang tidak sanggup untuk menyediakan daerah perumahan yang sehat mengakibatkan mereka yang bermigrasi memadati daerah perumahan kota yang sudah padat

⁵⁴ Kramat Tunggak dijadikan sebagai lokalisasi pelacuran oleh Ali Sadikin karena saat itu ia sangat sulit untuk memantau apalagi memberantas pelacuran di wilayah Jakarta sehingga dengan dilokalisasi diharapkan akan memudahkan pengawasan terhadap mereka. Dalam masalah lokalisasi pelacuran ini pun, ia mendapat tentangan yang keras dari berbagai unsur masyarakat yang menganggapnya telah mengesahkan adanya pelacuran. lihat Gita Jaya., *Catatan Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977. Op. Cit*, hlm. 47.

⁵⁵ Soetjipto Wirosardjono. *Masalah Urbanisasi dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Lingkungan Hidup*, P4L, Jakarta, 1974. hlm. 15.

dengan ditampung keluarga dan kenalannya. mereka menyewa rumah dengan harga yang mereka mampu (gubuk seadanya) tanpa fasilitas kesehatan lingkungan sama sekali. mereka menduduki tanah-tanah yang kosong, tanpa menghiraukan peraturan yang berlaku, terutama rumah-rumah di atas tanah-tanah yang sebenarnya direncanakan terbuka untuk kepentingan umum sesuai Rencana Induk Kota.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah DKI Jakarta melakukan pendekatan dengan melakukan perbaikan lingkungan perumahan pada tahun 1969, hal ini merupakan suatu pendekatan yang lebih maju dalam perencanaan pembangunan kota. Melalui program ini dapat diwujudkan dan didasari perlunya Suatu kerjasama yang terjalin antara usaha pemerintah dan peran serta masyarakat. Dengan program ini juga pemerintah mendorong penduduk untuk memperbaiki keadaan lingkungannya.

BAB III

Program Perbaikan Kampung: Proyek M.H.Thamrin Di Jakarta 1969—1979

A. Awal Dicetuskannya Program Perbaikan Kampung Tahun 1969.

Jakarta pada tahun 1960-an dikenal di luar maupun di dalam negeri sebagai sebuah kampung yang besar (big village). Bila ditinjau secara menyeluruh dari keadaan fisik Kota Jakarta, hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar daerahnya masih berupa perkampungan yang berada di tengah-tengah kota. Secara umum, sebagian besar wilayah kota Jakarta ditempati oleh pemukiman yang tidak terencana.⁸³ Kampung merupakan daerah kota yang tumbuh secara tidak teratur, spontan dan tidak resmi namun menempati sekitar 70% dari kota-kota besar dan modern di Indonesia.⁸⁴

Jumlah penduduk yang tinggal di kampung-kampung pada tahun 60-an diperkirakan 60% dari jumlah penduduk di Jakarta, yaitu berjumlah kurang lebih

⁸³ Pemukiman tidak terencana merupakan pemukiman yang semrawut tanpa mengindahkan norma-norma penataan lokasi maupun ruang. Pada umumnya belum terjamah fasilitas kota, sehingga taraf lingkungan hidup sangat rendah/kumuh, status tanah pada umumnya ilegal, taraf pendidikan dan pendapatan rendah. Pada pemukiman demikian menyebar ke penjuru kota. Lihat Darrundono, *pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup: Studi Kasus Kampung-kampung yang Sudah Diperbaiki Melalui Proyek MHT di Jakarta. Op. Cit*, hlm.25. Tidak Diterbitkan.

⁸⁴ Kampung merupakan bentuk permukiman marjinal, di mana lingkungannya secara umum nampak miskin, infrastruktur yang masih kasar, ketiadaan pelayanan dan masyarakatnya beraneka ragam serta heterogen namun rata-rata berpenghasilan rendah, lihat Zsu Zsa Baross, "Prospek Perubahan Bagi Golongan Miskin Kota." *Prisma*, Juni 1980, hlm. 23.

3 juta jiwa, jumlah ini meningkat karena pesatnya arus urbanisasi.⁸⁵ Hal tersebut mengakibatkan tekanan-tekanan pada persediaan tempat tinggal yang tidak dapat segera terpenuhi, disebabkan kemampuan yang terbatas dari pemerintah daerah saat itu. Kebijakan pemerintah lebih banyak menyediakan dan membangun proyek-proyek *real estate*, perumahan pemerintah dan swasta, lebih banyak menyediakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas. Mereka yang berpenghasilan rendah tak tersentuh, karena ketidakmampuan mereka untuk membeli atau menyewa perumahan seperti apapun bentuknya, pada akhirnya banyak anggota masyarakat yang memilih untuk tinggal di daerah pinggiran kota. Faktor-faktor ini menyebabkan daerah perumahan telah meluas ke daerah-daerah perbatasan di pinggir kota dan ke tempat-tempat di mana fasilitas-fasilitas prasarana tidak tersedia.

Tekanan penduduk yang pesat tersebut mengakibatkan lingkungan-lingkungan hidup yang telah ada menjadi semakin padat dan tumbuh tidak teratur, bahkan mengakibatkan tumbuhnya lingkungan hidup yang baru dan tidak sesuai dengan planologi, sedangkan perumahan-perumahan tersebut dibuat dengan tidak mengindahkan persyaratan-persyaratan kesehatan maupun keselamatan. Mereka membangun rumah-rumah mereka di atas lahan-lahan yang dapat mereka “temukan”, seperti bantaran sungai, rawa-rawa, kiri-kanan rel kereta api, kolong jembatan, bahkan kuburan.⁸⁶ Kondisi seperti ini yang menyebabkan Keadaan sosial ekonomi masyarakat kampung di Jakarta jauh dari kualitas yang wajar.

⁸⁵ Darrundono. *Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung*. Widyapura, Januari 1977. hlm. 42.

⁸⁶ Darrundono. *Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung, Studi Kasus : Proyek Muhammad Huni Thamrin di Jakarta*. Disertasi Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Jakarta, 2007, Tidak Diterbitkan.

gambaran keadaan kampung di Jakarta tahun 1960-an dapat dilihat dalam foto dibawah ini:

Foto 1
Keadaan kampung di Jakarta 1960-an



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali*)

Jumlah Penduduk yang demikian besarnya tidaklah mungkin untuk dibiarkan berlarut-larut menjadi beban pemerintah. Untuk menghadapi desakan perkembangan penduduk Jakarta, suatu pendekatan yang dianggap “konservatif” dalam dunia perencanaan adalah mengenakan sanksi yang berat terhadap gubuk-gubuk dan kampung-kampung liar tersebut, dengan cara menggusur/membongkarnya. Tindakan ini tidak berhasil dan hanya akan merugikan masyarakat kampung sendiri. Keadaan ini mendesak perlu diadakannya perbaikan lingkungan/perkampungan oleh pemerintah, dengan meningkatkan keadaan lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Pada tahun 1969, diadakanlah Program Perbaikan Kampung yang dicetuskan Gubernur Ali Sadikin untuk menanggulangi keadaan kampung-kampung di Jakarta yang serba padat dan kotor. Pemikiran Ali Sadikin untuk memperbaiki kampung timbul dari pengalamannya sewaktu ia menjadi siswa di sekolah pelayaran. Pada saat liburan, Sabtu dan Minggu, ia sering pergi ke rumah pamannya di daerah Bukit Duri, Jatinegara. Ia melihat keadaan kampung di sana bersih, jalan-jalannya bagus dan teratur. Gambaran tersebut masih melekat dan mendorong niat Gubernur Ali Sadikin untuk mencanangkan program perbaikan kampung di Jakarta.

Sebelumnya ia diberitahu oleh pak Djumadjitin yang saat itu menjabat sebagai Sekda, bahwa pada tahun 1934 pemerintahan Kolonial Belanda telah memperkenalkan apa yang disebut dengan istilah Kampung *Verbeetering*, yaitu kegiatan perbaikan jalan dan salurannya sebagai “santunan” untuk Pribumi Betawi. Seorang anggota *Volkstraad* bernama Muhammad Husni Thamrin, gigih

memperjuangkan bangsanya agar tempat tinggal pribumi dapat terbebas dari becek, kotor dan gelap. Perjuangannya saat itu berhasil dan timbullah kampung *Verbeetering*.⁸⁷ Hal sama nampaknya juga diikuti oleh Gubernur Ali Sadikin pada masa pemerintahannya. Dalam buku Gita Jaya Gubernur Ali Sadikin mengatakan:

“saya berpendapat bahwa kelompok penduduk yang terpaksa harus menempati perkampungan di sela-sela bagian kota yang terbangun rapih itu adalah justru warga kota yang lebih membutuhkan perhatian untuk menikmati hasil pembangunan. Mereka ini, seperti saya katakan, meliputi jumlah besar 60% dari jumlah penduduk Jakarta. Secara politis jumlah itu merupakan potensi yang sangat besar, sehingga bilamana mereka kurang mendapatkan perhatian sewajarnya dapat membawa kesulitan sosial politik yang rawan”.⁸⁸

Pemikiran Ali Sadikin tersebut akhirnya diusulkan ke BAPPENAS, dengan tujuan meminta bantuan ke BAPPENAS untuk program tersebut, tetapi oleh BAPPENAS program ini ditolak. Menurut BAPPENAS program ini tidak menguntungkan dan bukan prioritas pembangunan.⁸⁹ Dalam biografinya yang berjudul “Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977”, Ali Sadikin mengatakan :⁹⁰

“Saya pergi ke Bappenas. Saya mengharapkan dukungannya. Tapi waktu bicara dengan pimpinan Bappenas, Wijoyo Nitisastro, saya merasa gagasan saya ditolak karena perbaikan kampung bukan prioritas bagi mereka. Mereka seperti tidak melihat perbaikan kampung akan mendatangkan uang. Mereka melihat dari sudut ekonomi. Saya kecewa. Tentu saja saya tidak habis pikir. Mengapa perbaikan kampung bukan prioritas utama?perbaikan kampung banyak efeknya. Akan meningkatnya kesehatan, akan menolong kebersihan, akan jadi bagus. Sekurang-kurangnya tidak kumuh seperti itu. Dan dengan begitu pasti ada gerak di tengah masyarakat setempat,

⁸⁷ Soenarto. *Proyek Perbaikan Kampung Merupakan Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*. PPSIL. Jakarta, 1987. hlm. 50. Makalah Tidak Diterbitkan.

⁸⁸ Gita Jaya. *Op. Cit.*, hlm. 258.

⁸⁹ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008.

⁹⁰ Ramadhan K.H. *Op. Cit.*, hlm. 164.

mengarah pada perbaikan. Di mata saya, perbaikan kampung itu menyangkut juga perbaikan ekonominya. Saya jadi kecut melihat sikap dia begitu.”

Dengan ditolaknya program tersebut oleh BAPPENAS, langkah Ali Sadikin selanjutnya ialah dengan meminta persetujuan DPRD. Oleh DPRD program tersebut akhirnya disetujui. Dengan dana APBD program perbaikan kampung dilaksanakan pada awal Pelita I. Secara garis besar Program Perbaikan Kampung bertujuan untuk :⁹¹

I. menciptakan keadaan lingkungan yang secara minimal sesuai dengan norma kehidupan lingkungan yang layak.

II. menciptakan nilai-nilai kesehatan lingkungan agar tercipta kesehatan mental dan fisik masyarakat sehingga memungkinkan tumbuh dan meningkatnya dinamika prakarsa, kualitas dan produktivitas masyarakat.

III. menciptakan kehidupan masyarakat perkampungan yang bersifat kekotaan, hidup tentram, sehat, tertib dan teratur.

Pada tahun 1971, Kepala Seksi Kerja Sama Teknik dan Pusat Perencanaan Pembangunan PBB, yang bernama Kenneth Watts datang ke Jakarta. Ia terkesan oleh pelaksanaan perbaikan kampung di Jakarta, menurutnya program perbaikan kampung di Jakarta harus mendapat prioritas utama, karena hal itu dapat memberikan dorongan positif bagi pembangunan pada umumnya dan swadaya masyarakat pada khususnya.⁹²

⁹¹ Media Jaya. *Perbaikan Kampung Di DKI Jakarta*. Pemerintah DKI Jakarta.1987. hlm. 4.

⁹² Ramadhan K.H. *Op. Cit*, hlm. 167.

Pada tahun 1971 akhirnya lembaga-lembaga Internasional, baik PBB maupun Bank Dunia menilai positif program tersebut. Saat itu muncullah bantuan teknologi untuk membiayai proyek *Urban Development Study* Jakarta yang digarap oleh PCD (*Planned Community Development*), di antaranya studi tentang program perbaikan kampung. Pelaksanaan Proyek Perbaikan Kampung akhirnya mendapat bantuan Bank Dunia. Pembiayaan Proyek MHT, 50% berasal dari bantuan Bank Dunia berupa pinjaman dan 50 % lagi berasal dari Pemda DKI Jakarta.⁹³ Pinjaman dari Bank Dunia merupakan pinjaman negara yang dibayar oleh pemerintah pusat.

Dengan adanya bantuan Bank Dunia, di bulan September 1973, dengan surat keputusan Gubernur dan persetujuan DPRD, Program Perbaikan Kampung Jakarta ini kemudian diganti namanya dengan sebutan Proyek Mohammad Husni Thamrin atau disingkat Proyek MHT.⁹⁴ Pemerintah DKI Jakarta pada waktu itu menyadari bahwa dalam menunjang Repelita I dan Repelita-Repelita selanjutnya, seharusnya mengikut sertakan seluruh potensi masyarakat yang ada di wilayahnya.⁹⁵ Dipakai nama Mohammad Husni Thamrin adalah untuk mengenang jasanya yang memperjuangkan nasib rakyat kecil Jakarta di masa pemerintahan Belanda. Program Perbaikan Kampung ini pun dimulai bersamaan dengan dimulainya Repelita I. Bagi pemerintah DKI Jakarta tahun tersebut merupakan tahun selesainya pelaksanaan Rencana Rehabilitasi 3 tahun.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 117.

⁹⁴ Ramadhan K.H. *Op. Cit.* hlm. 168.

⁹⁵ Darrundono. *Loc. Cit.*, hlm. 41.

Proyek MHT mulanya ditetapkan untuk diselesaikan dalam 3 pelita yaitu tahun 1969 sampai 1984. namun dengan adanya bantuan Bank Dunia pada tahun 1973, Proyek dapat dipersingkat penyelesaiannya yaitu sampai dengan akhir Pelita II tahun 1979. Program Perbaikan Kampung ini dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan yang ada. Adapun kriteria dalam pemilihan kampung dilihat dari kondisi lingkungan yang terburuk, kepadatan yang tinggi, potensi dinamika penduduk setempat untuk melanjutkan dan memelihara hasil perbaikan yang ada, terakhir dilihat juga pada usia kampung tersebut, sehingga kampung-kampung lama mendapat prioritas utama.⁹⁶

B. Keadaan Sosial Masyarakat Kampung

Untuk mendapat gambaran keseluruhan terutama keadaan sosial masyarakat kampung di Jakarta yang terkena Program Perbaikan Kampung, perlu ditinjau beberapa indikator seperti, pendapatan, pengeluaran rata-rata, lapangan usaha, pendidikan, kondisi perumahan, kondisi kesehatan dan sebagainya. Dari indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kampung di Jakarta masih dalam keadaan kualitas hidup yang rendah.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pada umumnya kepala rumah tangga di kampung-kampung di Jakarta yang akan diperbaiki pada Pelita I dan Pelita II, rata-rata berpendidikan sekolah dasar. Atas dasar kondisi ekonomi yang lemah serta masih kurangnya sarana pendidikan mendorong masyarakat setempat untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Djahrudin (61), warga Rt 07 Utan Panjang kelurahan Kemayoran mengatakan bahwa semenjak ia kecil

⁹⁶ Ratu Husmiati. *Op. cit.*, hlm.123.

orang tuanya lebih mengedepankan pendidikan agama kepadanya.⁹⁷ Hal serupa dirasakan juga oleh ibu Nurhasanah (51) warga kampung Pulo Besar, setelah lulus Iptidayah (sekarang setingkat SD) ia tidak melanjutkan ke tingkat tsanawiyah (sekarang setingkat SMP) karena kondisi ekonomi yang tidak mencukupi. Kegiatan sehari-harinya dihabiskan hanya untuk membantu orang tuanya di rumah.⁹⁸

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Kantor Sensus dan Statistik DKI Jakarta tahun 1975 mengenai lapangan pekerjaan, para kepala keluarga yang tinggal di kampung-kampung, kebanyakan bekerja antara lain sebagai pegawai negeri sipil, ABRI, pedagang atau pengusaha kecil, tukang kuli, pegawai swasta, supir, sedangkan sisanya bekerja di bidang industri. Di mana pendapatan rata-rata untuk Jakarta adalah Rp. 42.750,-/keluarga/bulan, sedangkan di kampung-kampung penghasilan masyarakat pada tahun 1975 adalah rata-rata Rp. 15.600,-/keluarga per bulan. Mengenai tempat tinggal mereka, pada umumnya penduduk tinggal di rumah mereka sendiri, sedangkan lainnya menempati rumah sewaan, kontrak dan lain-lain.⁹⁹ Untuk masyarakat migran biasanya lebih banyak menempati rumah sewaan/kontrakan. Bapak Sumarno (62) adalah masyarakat pendatang, ia terpaksa menempati rumah kontrakan karena penghasilannya sebagai buruh pabrik tidak mencukupi untuk membeli/membangun rumah. Harga

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Djahrudin(61), Jln. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 4 Juli 2008.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Nurhasanah (51), Jln. Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

⁹⁹ Bianpoen. *Perkampungan Kota: Kasus Jakarta. Widyapura*, 1979, hlm.115-116.

tanah menurutnya masih mahal dan harganya masih terus meningkat setiap tahun.¹⁰⁰

Fasilitas air yang digunakan masyarakat kampung untuk keperluan memasak/minum dan kebutuhan lainnya masih memprihatinkan terutama diwilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, masyarakat setempat harus membeli air untuk keperluan sehari-hari akibat buruknya kondisi air tanah. Buruknya kondisi air tanah dirasakan masyarakat di daerah kampung Kebon Bawang dan kampung Pulo Besar Jakarta Utara serta kampung Angke di Jakarta Barat. Untuk keperluan mencuci dan mandi masyarakat setempat masih menggunakan air sumur, sedangkan untuk memasak/minum masyarakat harus membeli, hal tersebut dilatarbelangi oleh ketidakmampuan masyarakat untuk berlangganan air bersih kepada Perusahaan Air Minum (PAM).

Mengenai kondisi fisik bangunan rumah, lebih dari 50% bahan dinding rumah mereka terbuat dari bambu dan lainnya dari tembok atau papan sedangkan bahan lantai rumah mereka sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan sebab lebih dari 50% sudah diubin dan disemen, sedangkan sisanya lagi masih berupa tanah.¹⁰¹ Nurhasanah (51) Warga kampung Pulo Besar masih bisa merasakan keadaan lantai rumahnya yang masih berupa tanah, serta dinding rumahnya yang masih berupa papan. Hal ini dilatar belakangi kondisi ekonomi masyarakat yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari.¹⁰²

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Sumarno, warga kampung Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Nurhasanah (51), Jln. Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

Masalah pembuangan air kotor di lingkungan masyarakat masih memprihatinkan. Pada umumnya pembuangan air kotor di kota-kota yang pertumbuhannya sudah direncanakan secara baik, masalah sistim penyaluran air kotor telah pula direncanakan secara matang. Tetapi Jakarta tidak memiliki sistem ini. Pembuangan air kotor tidak disalurkan dalam sistem pembuangan air kotor, tetapi dibuang secara setempat melalui sistem *septictank*. Sistem yang terakhir ini memang tidak memerlukan biaya yang besar, bahkan anggaran pembuatannya dapat ditanggung seluruhnya oleh masyarakat. Tetapi sistem ini nampaknya sangat riskan untuk digunakan di daerah perumahan yang padat penduduknya. Persyaratan jarak letak di antara sumur-sumur air dangkal yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum dengan *septictank* tidak lagi dapat dipenuhi, akibatnya masyarakat terpaksa menggunakan air yang tidak lagi memenuhi syarat kesehatan.¹⁰³

Sedangkan untuk masalah kesehatan. Pada tahun 1976 didata jumlah persentase masyarakat kampung di Jakarta yang terkena wabah penyakit di antaranya, Cacar 8,70%, Demam berdarah 19,56%, Muntaber 51,09%, lainnya 20,65%, di mana ketiga wabah tersebut erat hubungannya dengan kebersihan lingkungan.¹⁰⁴

C. Perencanaan Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung

Program Perbaikan Kampung adalah suatu program yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan lingkungan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan

¹⁰³ Gita Jaya. *Op. Cit.* hlm. 246.

¹⁰⁴ Bianpoen. *Loc. Cit.*, hlm. 113.

di perkampungan-perkampungan di kota-kota yang kondisinya buruk. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan dan buruknya fasilitas-fasilitas seperti: jalan-jalan, air minum, tata pengairan dan fasilitas-fasilitas pembuangan sampah.

Usaha ini dimaksudkan untuk membantu penduduk terutama yang berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas hidupnya, terutama kesehatan lingkungan. Pekerjaan pokok dalam Program Perbaikan Kampung ini adalah berusaha untuk mengadakan prasarana Fisik dan fasilitas umum lingkungan perkampungan. Prasarana fisik dan fasilitas umum yang akan dibangun/diperbaiki di lingkungan tersebut ialah :¹⁰⁵

- A. prasarana perhubungan : a. jalan kendaraan
b. jalan orang
c. jembatan kendaraan
d. jembatan orang
- B. prasarana pembuangan air : e. saluran jalan
f. saluran penghubung
- C. fasilitas air minum : g. pipa penghubung
h. kran umum
i. sumur bor
- D. Fasilitas pembuangan air kotor : j. M.C.K/ jamban kel.
- E. fasilitas pembuangan sampah : k. bak sampah
l. gerobak sampah
- F. fasilitas kesehatan : m. puskesmas

¹⁰⁵ Bappem MHT. *Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT)*. DKI Jakarta. 1974. hlm. 13.

n. pos kesehatan

G. fasilitas pendidikan

: o. sekolah dasar

Dalam perencanaan pelaksanaan program-program tersebut secara kronologis pokok-pokok kegiatan-kegiatan yang dilakukan, pertama adalah proses pemilihan kampung/*survey* kampung. *Survey* tersebut dilakukan dengan langsung melihat keadaan kampung dan dengan menggunakan foto udara untuk mendapat gambaran keadaan kampung. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui kampung-kampung yang mendapat prioritas, apakah kampung tersebut memenuhi syarat kriteria-kriteria yang ditentukan dalam program perbaikan kampung. Pertimbangan untuk menentukan kampung-kampung mana saja yang mendapat prioritas pelaksanaan tergantung pada kondisi genangan air/banjir di kampung, keadaan dari air minum di kampung, masalah sanitasi air, masalah kesehatan lingkungan, kondisi jalan di kampung, masalah mental masyarakat di kampung, pendapatan penduduk kampung tersebut, lokasi kampung, keadaan bangunan di kampung, jumlah sarana pendidikan yang ada di kampung tersebut, kepadatan penduduk kampung yang tinggi, potensi dinamika penduduk untuk melanjutkan dan memelihara hasil-hasil perbaikan yang nyata ada, usia dari kampung itu, kampung-kampung lama yang mendapat prioritas.¹⁰⁶ Menurut Darrundono (73) setelah ditetapkan kriteria-kriteria pada kampung yang akan diperbaiki, kemudian kriteria-kriteria tersebut di dinilai dan diteliti dengan memberi angka (nilai) sesuai dengan keadaan dari setiap faktor yang dinilai, kemudian nilai dari semua

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 16

faktor tersebut di atas dikumpulkan dan terhadap kampung-kampung yang mendapat angka tertinggi (nilai 9) di berikan prioritas pertama perbaikan.¹⁰⁷

Kampung-kampung yang telah memenuhi syarat-syarat kriteria tersebut, kemudian dibawa lagi ke sidang panitia pengarah. Dalam rapat ini dihasilkan suatu keputusan mengenai kampung-kampung yang akan mendapat perbaikan dalam satu anggaran. Kampung-kampung hasil sidang, selanjutnya diajukan ke Gubernur untuk diputuskan dan selanjutnya dikeluarkan surat keputusan Gubernur yang menetapkan kampung-kampung yang mendapat perbaikan.¹⁰⁸

Setelah ditetapkannya kampung-kampung yang akan diperbaiki oleh Gubernur dengan surat keputusan, maka tahap selanjutnya dilakukan penelitian terperinci. *Survey* ini di kerjakan oleh BAPPEM Proyek M.H. Thamrin, bersama-sama Dinas Tata Kota, Walikota, Camat dan Lurah, untuk memperoleh suatu gambaran mengenai kebutuhan akan proyek di kampung-kampung tersebut.¹⁰⁹

Hasil penelitian tersebut, kemudian dibawa dalam sidang *Planning* untuk memutuskan dapat tidaknya proyek tersebut dilaksanakan. Sidang *Planning* ini diselenggarakan oleh BAPPEM Proyek M.H.T dengan diikuti oleh Instansi-instansi terkait seperti, Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan umum, Dinas Kebersihan, Dinas Kesehatan, Dinas P dan P, P.A.M. Jaya, Walikota, Camat dan Lurah.¹¹⁰

¹⁰⁷Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008.

¹⁰⁸ Badan Pelaksana Pembangunan (Bappem Proyek MHT). *Pokok-pokok Pikiran Program Program Perbaikan Kampung Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Rencana Induk Kota Jakarta Tahun 1985-2005*. DKI Jakarta. Hlm. 8.

¹⁰⁹ Bappem MHT. *Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT)*. *Op.cit.*, hlm. 21.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

Setelah sidang perencanaan selanjutnya dilakukan pengusulan anggaran pembangunan atau di sebut Daftar Usulan Proyek (D.U.P) untuk tiap-tiap tahun, di mana pengusulan anggaran ini disusun berdasarkan gambaran kecil besarnya jenis proyek yang diperoleh dari hasil sidang perencanaan. Selanjutnya dilakukan pengukuran rencana terperinci, pengukuran rencana ini berupa *opname* keadaan tinggi rendahnya keadaan lapang khususnya untuk jalur-jalur jalan dan saluran. Di dalam mempermudah penentuan konstruksi dari proyek-proyek yang akan dikerjakan pada setiap kampung, maka diadakan penyelidikan keadaan tanah pada lokasi-lokasi proyek yang akan dibangun di setiap kampung-kampung tersebut.

Di dalam perencanaan pelaksanaan perbaikan kampung terdapat kebijakan-kebijakan dalam proses pelaksanaan, di mana pelaksanaan perbaikan kampung tidak dapat sekaligus dilaksanakan, hal ini banyak tergantung pada kemampuan dana pemerintah yang di dapat dari berbagai sumber. Dengan keterbatasan dana tersebut pemerintah daerah DKI Jakarta perlu dilakukan pengaturan pertahapan dan nilai-nilai prioritas dengan pengertian bahwa daerah perbaikan tidak tertumpuk pada suatu wilayah, tapi secara menyebar di seluruh wilayah.

Adapun sasaran pelaksanaan Program Perbaikan Kampung diarahkan pada usaha perbaikan prasarana fisik, fasilitas kesejahteraan sosial, dan sanitasi dengan disertai penyuluhan yang efektif dengan penanaman modal atau biaya yang terbatas oleh pemerintah dengan harapan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh masyarakat sendiri berupa swadaya.

D. Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung Pelita I-Pelita II

D. 1. Mobilisasi Dana Proyek MHT Melalui Dana APBD dan Bantuan Bank Dunia

Proyek perbaikan kampung merupakan bidang pembangunan yang ada dalam pelita I. Pemerintah DKI Jakarta dengan dana APBD telah menyediakan 11,22% dari keseluruhan jumlah anggaran sebesar Rp 16.400.000.000,- dalam periode 1969/1970, sedang untuk tahun 1970/1971 bidang kegiatan pembangunan perbaikan kampung mendapat dana sebesar 16,65% dari dana yang berjumlah Rp 33.224.500.000,- untuk periode 1971/1972, bidang perbaikan kampung mendapat dana sebesar 15,57% dari jumlah keseluruhan Rp 8.063.277.519,58,-, sedangkan periode 1972/1973 proyek MHT ini mendapat dana 12,88% dari jumlah anggaran Rp 13.217.192.210.98 dan pada periode 1973/1974 yang merupakan periode akhir dari Pelita I proyek MHT mendapat dana 12,21% dari dana Rp 15.760.500.000.¹¹¹

Proyek perbaikan kampung di Jakarta merupakan proyek yang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat saat itu bermaksud mempercepat penyelesaian program perbaikan kampung yang ditargetkan selesai pada 3 Pelita (1969-1983) menjadi 2 Pelita (1969-1979), dengan mengusahakan pinjaman dari Bank Dunia.

Sehubungan dengan permintaan tersebut, pada tahun 1971, Bank Dunia mengirimkan perwakilannya ke Indonesia untuk melihat kemungkinan pemberian bantuan di bidang pembangunan kota. Akhirnya, baik PBB maupun Bank Dunia menilai program ini positif. Saat itu muncul bantuan teknologi untuk membiayai proyek *Urban Development Study* Jakarta yang digarap oleh PCD (*Planned*

¹¹¹ Tesis Ratu Husmiati. *Op. cit.*, hlm. 123. Tidak Diterbitkan.

Community Development), di antaranya studi tentang program perbaikan kampung. Dari hasil *study* tersebut telah disusun laporan untuk membiayai pelaksanaan program perbaikan kampung di Jakarta.

Dalam bulan April 1973 Bank Dunia telah mengirimkan tim untuk mengkaji hasil *study* P.C.D. tim ini disusul lagi dengan *appraisal team* yang datang pada bulan Juli dan November 1973 dan bulan Februari 1974. pada akhirnya Bank Dunia menyatakan kesediaannya untuk membantu pembangunan program perbaikan kampung di Jakarta.

Pelaksanaan Proyek Perbaikan Kampung akhirnya mendapat bantuan Bank Dunia. Pembiayaan Proyek MHT, 50% berasal dari bantuan Bank Dunia dan 50 % lagi berasal dari Pemda DKI Jakarta. Pemerintah Daerah menyetujui menerima pinjaman Bank Dunia, karena Pemda mendapat keuntungan dari pinjaman ini yang antara lain ialah karena Pemerintah Daerah mendapat pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah, program perbaikan kampung dapat dipercepat.

Dalam kontrak pertama, ditandatangani pinjaman sebesar \$ 18.200.000, disesuaikan dengan nilai uang yang berlaku pada saat itu dengan persyaratan: *Grace period* 5 tahun, masa pengembalian 15 tahun dengan bunga 8 1/2 % per tahun, kontrak ini digunakan untuk pembiayaan proyek MHT selama 1974 sampai dengan 1976, sedangkan untuk 3 tahun Pelita II, pinjaman disetujui sebesar US \$ 44.050.000 dengan kelonggaran waktu 3 tahun, masa pengembalian 17 tahun

dengan bunga 8,9% per tahun.¹¹² pinjaman ini merupakan pinjaman negara yang dibayar oleh pemerintah pusat.

Di samping itu pengaturan dan pelaksanaan kredit Bank Dunia ini telah mendapat pengesahan dari DPRD-DKI dan Menteri Dalam Negeri. Adanya kredit dari Bank Dunia tersebut di samping hasil dan manfaat serta dipercepatnya waktu pelaksanaan, keuntungan lain di dalam perbedaan antara besarnya bunga dengan besarnya tingkat inflasi yang berlaku di Indonesia.

D. 2. Pelaksanaan Program Perbaikan Kampung: Proyek M.H.Thamrin

Dalam menentukan kampung-kampung yang akan diperbaiki dalam Program Perbaikan Kampung Pelita I - Pelita II tahun 1969-1979, terdapat bermacam-macam kriteria. Dua di antaranya menentukan bahwa kampung-kampung tersebut harus padat dan kondisinya harus buruk. Dalam pemilihan kampung, azas pemerataan harus diadakan pada tahap pemilihan kampung, hal ini dikarenakan Jakarta terdiri dari lima wilayah Kota Madya. Atas keterbatasan dana tidak semua kampung di Jakarta masuk dalam perbaikan.¹¹³

Di luar kriteria-kriteria yang ditentukan di atas, terdapat kriteria lain yang di antaranya ialah suatu pertimbangan politik yang menentukan kampung tersebut masuk dalam prioritas perbaikan. pada tahun 1971, kampung Melayu Kecil Kelurahan Bukit Kecamatan Tebet, di mana seharusnya daerah ini tidak masuk dalam perbaikan karena pendapatan masyarakatnya masih menengah, tetapi

¹¹² Tesis Ratu Husmiati. *Ibid.*, hlm. 124.

¹¹³ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008

karena akan adanya PEMILU pada tahun 1972, daerah ini akhirnya diputuskan untuk diperbaiki.¹¹⁴

Pada tahun 1969 dimulai tahap pertama pelaksanaan perbaikan kampung, dipilih 5 kampung pertama yang akan diperbaiki. Kelima kampung tersebut ialah daerah Krendang di Jakarta Barat, Rawa Badak di Jakarta Utara, Menteng Wadas di Jakarta Selatan, Kemayoran Kecil di Jakarta Pusat, dan Kayu Manis di Jakarta Timur. Kampung-kampung yang mendapat prioritas perbaikan itu adalah kampung-kampung lama yang memang sudah ada sejak jaman penjajahan dulu dan belum pernah mengalami perbaikan. Dari kelima kampung tersebut ternyata kampung Krendanglah yang paling parah. Kampung Krendang merupakan kampung tertua di Ibukota, kampung ini tumbuh dan berkembang sendirinya tanpa adanya perencanaan dan perbaikan. Oleh sebab itu kampung ini memperoleh anggaran terbanyak yakni sebesar Rp 150 juta, Rawa Badak sebesar Rp 107 juta, sedangkan ketiga kampung lainnya umumnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 70 – Rp 80 juta.¹¹⁵ Menurut Bapak Zuhaimi (69) alasan utama diperbaikinya kampung di kelurahan Rawa Badak dikarenakan kondisi jalan yang sering rusak dan becek ketika musim hujan datang serta tidak adanya tersedianya sarana untuk mendapatkan air bersih. Prioritas pembangunan di daerah ini ialah mengedepankan pada perbaikan Jalan kendaraan dan jalan orang yang sering rusak dan berlumpur akibat banjir pada musim penghujan, serta pembangunan

¹¹⁴ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008

¹¹⁵ *Kompas*. 4 September 1969.

fasilitas air bersih seperti hydrant serta sumur bor.¹¹⁶ Sarana dan prasarana yang dibangun Proyek perbaikan kampung pada kelima kampung tersebut antara lain berupa, jalan kendaraan dan jalan setapak, jembatan, pembangkit listrik, kincir angin, *hydrant* umum, *booster pump* dan rehabilitasi pipa air. pada sarana sanitasi di antaranya berupa tempat-tempat mandi, cuci dan kakus (MCK), bak sampah serta gerobak-gerobak sampah, sarana ini belum tersedia di kelima kampung tersebut. Mengenai pembangunan sarana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2
Pembangunan sarana jalan dan jembatan di kampung



¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.



(Sumber: *Darrundono. A Tribute to Bang Ali*)

Pelaksanaan Perbaikan Kampung pada Pelita I 1969-1974 secara langsung ditangani oleh Dinas masing-masing dan Camat sebagai Proyek Officernya yang dibantu oleh seorang Pembantu Tehnik dengan beberapa orang staf. Untuk pembangunan MCK, Bak Sampah, Gerobak Sampah, ditangani langsung oleh Dinas Kebersihan; *Hydrant* Umum, Pipa Penghubung, Sumur Bor, langsung ditangani oleh Perusahaan Air Minum DKI Jakarta; Jalan, Jembatan, Saluran Air, Bangunan Gedung, Langsung ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta; untuk perencanaan planologisnya langsung ditangani oleh Dinas Tata Kota.¹¹⁷

Pada pelaksanaan perbaikan Pelita I 1969-1974, mulanya Program Perbaikan Kampung ini sedikit terhambat, terkait dengan masalah pembebasan tanah untuk pelebaran jalan maupun pembangunan sarana-prasarana. Kendala lain juga timbul dari sebagian masyarakat kampung, terutama para Ulama,

¹¹⁷ Bappem MHT. *Op. cit.*, hlm 8.

dikarenakan pendanaan yang dipakai dalam Program ini sebagian didapat dari hasil pajak judi yang masuk ke dana APBD. Kebijakan tentang legalisasi perjudian dan pemungutan pajak judi dilakukan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1967, pajak judi tersebut dipakai untuk pembiayaan pembangunan, pembangunan di bidang pendidikan, sosial dan sarana, bahkan program perbaikan kampung.¹¹⁸ menurut Mahmud (68) warga kampung Warakas, hal tersebut dianggap wajar, menurutnya program perbaikan kampung memberi manfaat bagi warga setempat karena sarana dan prasarana yang dibangun memang betul-betul dibutuhkan warga saat itu, walaupun ada warga yang tidak setuju itu hanya segelintir saja. Darrundono (63) mengatakan bahwa ia setuju dengan kebijakan Ali Sadikin mengenai digunakannya pajak judi, karena sebagian pembangunan yang terjadi di DKI Jakarta memang menggunakan hasil pajak judi. Pro-kontra terhadap penggunaan dana pajak judi untuk perbaikan kampung terus berlanjut sampai dengan dikeluarkannya undang-undang No. 7 oleh Pemerintah Pusat tahun 1974 tentang larangan Gubernur Kepala Daerah untuk memungut pajak perjudian. Saat itu juga pendanaan Program Perbaikan Kampung tidak lagi menggunakan dana yang diambil dari hasil pajak judi.¹¹⁹ Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh Camat, Lurah, Rw, dan Rt serta tokoh masyarakat setempat memang dibutuhkan.

¹¹⁸ Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Surat keputusan NO. Bd/9/1/5/1967 tentang larangan penyelenggaraan perjudian gelap di dalam wilayah DKI Jakarta. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, Ali Sadikin telah melegalkan perjudian dan mendapat dana untuk membangun kota Jakarta. Dari legalisasi perjudian ini pemerintah DKI memungut pajak yang besar untuk tempat-tempat perjudian di Jakarta. Jadi judi yang diselenggarakan pemerintah DKI Jakarta hanya bagi orang-orang tertentu saja. Hasil judi itu sendiri dimasukkan kedalam APBD, dalam kelompok penerimaan khusus. Lihat Tesis Ratu Husmiati.

¹¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan.

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu diadakan pendekatan/penjelasan terhadap masyarakat kampung yang tanah/lahan yang terpaksa harus “dipotong”. Rodjali (63) warga kampung Rawa Badak mengatakan bahwa masyarakat di kampungnya mau tidak mau harus merelakan sebagian halaman rumahnya dipotong ½ meter untuk pelebaran jalan serta pembuatan saluran air.¹²⁰ H Madinah (59) warga Kemayoran Kecil, sempat menolak ketika sebagian halaman samping rumahnya harus terpotong untuk pelebaran jalan dikarenakan tidak adanya ganti rugi atas pembebasan lahan, namun atas dasar kepentingan bersama serta penjelasan dari Rw setempat, maka akhirnya ia setuju sebagian halamannya terpotong.¹²¹

Hambatan juga terjadi pada pembangunan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK), dikarenakan sulitnya mendapatkan tanah/ lahan untuk sarana tersebut, terutama pada kampung-kampung yang padat penduduknya, juga masyarakat merasa enggan di dekat rumah mereka terdapat bangunan tersebut, karena unsur K (kakus) selalu menimbulkan kesan yang buruk.¹²² Hal ini terjadi di kampung Warakas, di mana tidak tersedianya lahan untuk membangun sarana tersebut dikarenakan keadaan kampung yang sudah padat oleh pemukiman penduduk. Hal lain juga disebabkan masyarakat masih enggan apabila di dekat rumahnya terdapat sarana tersebut.¹²³ Mulai tahun 1976 direncanakan oleh Bappem MHT untuk pembangunan M.C. (mandi cuci) terpisah dari K (kakus), unsur K

¹²⁰ Wawancara dengan bapak Rodjali (63), Rawa Badak I, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

¹²¹ Wawancara dengan bapak H. Madinah (59), Kemayoran Kecil, Kemayoran, Jakarta Pusat. 6 Juli 2008.

¹²² Darrundono, *Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung*. Loc. Cit. Hlm. 46.

¹²³ Wawancara dengan bapak Mahmud (68), Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 29 Juni 2008.

dipisahkan dan diusahakan ditempatkan di lokasi-lokasi yang sifatnya lebih tersembunyi. Ukuran dari bangunan-bangunan itu pun diperkecil untuk memudahkan mendapatkan tanahnya.¹²⁴

Pada akhir Pelita I tahun 1974, kampung-kampung yang sudah diperbaiki berjumlah 89 buah di 17 buah kecamatan yang mencakup luas 2.400 Ha dengan jumlah penduduk 1.200.000. pada umumnya terdiri dari kampung-kampung yang dibangun sebelum tahun 1956, terletak di daerah Pusat Kota dengan tingkat kepadatan penduduknya rata-rata mencapai 500 jiwa per Ha.¹²⁵

Pada tahun 1971, Program Perbaikan Kampung yang diadakan di Jakarta pada Pelita I mendapat penilaian positif oleh lembaga-lembaga International, baik di lingkungan PBB maupun Bank Dunia. Untuk pelita II periode 1974/1975 terjadi perubahan dalam pembedangan pembangunan DKI Jakarta. Bidang perbaikan kampung tidak masuk dalam kegiatan pembangunan khusus pemerintah DKI Jakarta. Proyek ini pada pelita II telah di danai oleh pemerintah pusat dengan bantuan Bank Dunia.¹²⁶ Bantuan Bank Dunia tersebut meliputi 50% dari biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan tahap berikutnya, yang meliputi pelaksanaan perbaikan selama 5 tahun. dengan adanya bantuan Bank Dunia ini program yang semula digambarkan akan meliputi 3 Repelita, dapat di penyelesaiannya sehingga pada tahun 1979 sebagai akhir Pelita II semua kampung di Jakarta direncanakan sudah diperbaiki.¹²⁷

¹²⁴ Darrundono. *Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung*. Loc. Cit. Hlm. 46.

¹²⁵ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm.125.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 122.

¹²⁷ Gita Jaya. *Op. cit.*, hlm. 260.

Perangkat pelaksanaan Program perbaikan kampung sebagai konsekuensi dari adanya kredit tersebut mendorong adanya perubahan pada proses pelaksanaan proyek perbaikan kampung. Untuk pelaksanaan proyek, Gubernur DKI Jakarta saat itu membentuk unit khusus untuk menangani program perbaikan kampung yang disebut Badan Pelaksana Pembangunan Proyek M.H. Thamrin (BAPPEM MHT).¹²⁸ Badan ini berdiri sendiri dalam menangani seluruh sektor terpadu dari proyek-proyek yang terdapat di dalam program perbaikan kampung. Walaupun demikian penyertaan unsur Pamong tetap dilakukan. Camat membawahi kampung yang diperbaiki ditetapkan sebagai menejer lapangan. Demikian pula dilibatkan peranan dari lurah-lurah setempat sebagai ketua LKPMDDK.

Pada tahun pertama Pelita II 1974/1975 dilakukan perbaikan pada 242 kampung dari berbagai wilayah. Wilayah Jakarta Pusat terdapat 7 Kecamatan dengan jumlah kampung 20 buah, di antara kampung-kampung tersebut yang mempunyai tingkat kepadatan paling tinggi terdapat di kampung Kebon Sayur Kecamatan Sawah Besar, dengan tingkat kepadatan penduduk 982 Jiwa/Ha. wilayah Jakarta Utara terdapat 3 Kecamatan dengan jumlah kampung yang diperbaiki sebanyak 3 buah, yaitu kecamatan Koja, Tanjung Priok, dan Penjaringan. Jakarta Barat terdapat 2 Kecamatan dengan jumlah kampung sebanyak 10 buah. Pada wilayah ini tingkat kepadatan penduduk terdapat pada daerah Jembatan Duren di kelurahan Jelambar dengan Kepadatan penduduk sebanyak 896 jiwa/Ha. Jakarta Selatan terdapat 2 kecamatan yaitu kecamatan Setia Budi dan kecamatan Tebet dengan jumlah kampung yang diperbaiki

¹²⁸ Gita Jaya. *Ibid.*, hlm. 260.

sebanyak 6 kampung dengan tingkat kepadatan tertinggi pada kampung Karet Karya Selatan, kepadatan penduduk sebanyak 785 jiwa/Ha, sedangkan pada wilayah Jakarta Timur terdapat 3 kecamatan yaitu, Jatinegara, Pulo Gadung, Matraman. Jumlah kampung yang diperbaiki di Jakarta Timur sebanyak 14 buah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada kampung Kebon Sereh.¹²⁹

Pada awal Pelita II tahun pertama, secara keseluruhan terdapat 53 kampung yang sudah diperbaiki di 17 kecamatan, luas area mencapai 1.140 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 515.500 jiwa, jumlah dana yang dihabiskan untuk tahun ini sebesar Rp. 6.129.499.690,38. pada tahun ini terdapat perbaikan bangunan sosial yang berjumlah 31 bh, yang pada pelita I tidak dilakukan akibat keterbatasan dana.¹³⁰ Secara keseluruhan Program Perbaikan Kampung pada Pelita II telah memecahkan masalah sebanyak 242 buah kampung yang tersebar pada 88 wilayah kelurahan di 11 wilayah kecamatan. Dengan luas jangkauannya sebanyak 5.806 Ha, yang dapat dinikmati oleh 1.918.411 jiwa penduduk yang ada di kampung-kampung di Jakarta, untuk dana sebesar Rp. 28.818,59,- per jiwa. Secara keseluruhan Program perbaikan Kampung pada Pelita II telah menghabiskan dana sebesar Rp. 55.285.909.604,-.¹³¹ Untuk prasarana yang dibangun pada Pelita II tidak jauh beda dengan prasarana yang dibangun pada Pelita I. Perbedaannya sendiri terdapat pada bertambahnya penyediaan sarana kesejahteraan sosial berupa pembangunan/perbaikan sarana pendidikan dan balai-balai rakyat.

¹²⁹ Lihat Lampiran 6. Kampung- kampung yang Terkena Proyek MHT

¹³⁰ Gita Jaya. *Op. Cit.*, hlm. 262-263.

¹³¹ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm. 126.

D. 3. Peran Masyarakat Kampung dalam Pelaksanaan Proyek M.H.T.

Gagasan perbaikan kampung sebenarnya berasal dari masyarakat kampung itu sendiri. Penduduk kampung berusaha memperbaiki keadaan lingkungannya dengan cara bersama-sama mengumpulkan bahan-bahan atau puing-puing bangunan untuk menambal jalan-jalan yang becek dan berlobang.¹³² Untuk mengurangi beban dalam pembiayaan, Pemda DKI sendiri mengeluarkan apa yang disebut dengan rumus 60%-40%. Artinya apabila warga dari satu kampung dapat mengumpulkan 60% dari dana yang diperlukan maka pemerintah akan memberikan bantuan 40% kekurangannya, cara ini ternyata berhasil merangsang masyarakat kampung untuk mengumpulkan dana bagi perbaikan kampungnya.¹³³

Di dalam tahap perencanaan Proyek M.H.T, keikutsertaan masyarakat juga merupakan usulan-usulan rencana peletakan tapak dan garis, baik prasarana maupun sarana kota. Pada tahap perencanaan ada kebijaksanaan yang diciptakan oleh masyarakat sendiri dan disalurkan lewat tokoh masyarakat atau Lurah/Camat setempat untuk penduduk yang tidak mampu. Zuhaimi (69) mengatakan bahwa untuk masyarakat yang tidak mampu/miskin ataupun tua/janda yang bangunannya terkena proyek sebagian atau keseluruhan, akan mendapat santunan. Santunan itu datang dari tokoh masyarakat yang mengumpulkan dana dari warga yang dianggap mampu.¹³⁴

Proyek MHT mendapat tanggapan positif dari masyarakat kampung, terbukti dari kerelaan mereka untuk mengorbankan sebagian dari halaman dan

¹³² Wawancara dengan Bapak H. Rodjak (70 tahun), Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 8 Juni 2008.

¹³³ Media Jaya. *Ibid.*, hlm. 4.

¹³⁴ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

bahkan bangunan untuk proyek tersebut.¹³⁵ Dalam pelaksanaan proyek MHT, tampak keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan perbaikan, terutama pada pembangunan/perbaikan sarana yang dibangun dekat dengan tempat tinggal mereka. Djahrudin (61) warga kampung Pulo Besar mengaku ikut serta pada pelaksanaan Proyek MHT di kampungnya, terutama pada perbaikan/pembangunan jalan-jalan dan saluran air, bahkan warga kampung Pulo Besar, bersedia membongkar sendiri halaman yang terpotong untuk pelebaran jalan.¹³⁶

Menurut Bappem MHT secara garis besar keterlibatan masyarakat dalam Pelaksanaan Proyek MHT terbagi kedalam 3 jenis, yaitu keterlibatan:¹³⁷

- a. dengan memberikan bantuan tenaga dan pikiran
- b. bantuan material, dana dan bahan
- c. bantuan yang berupa pengorbanan sebagian tanah milik atau sebagian rumah mereka

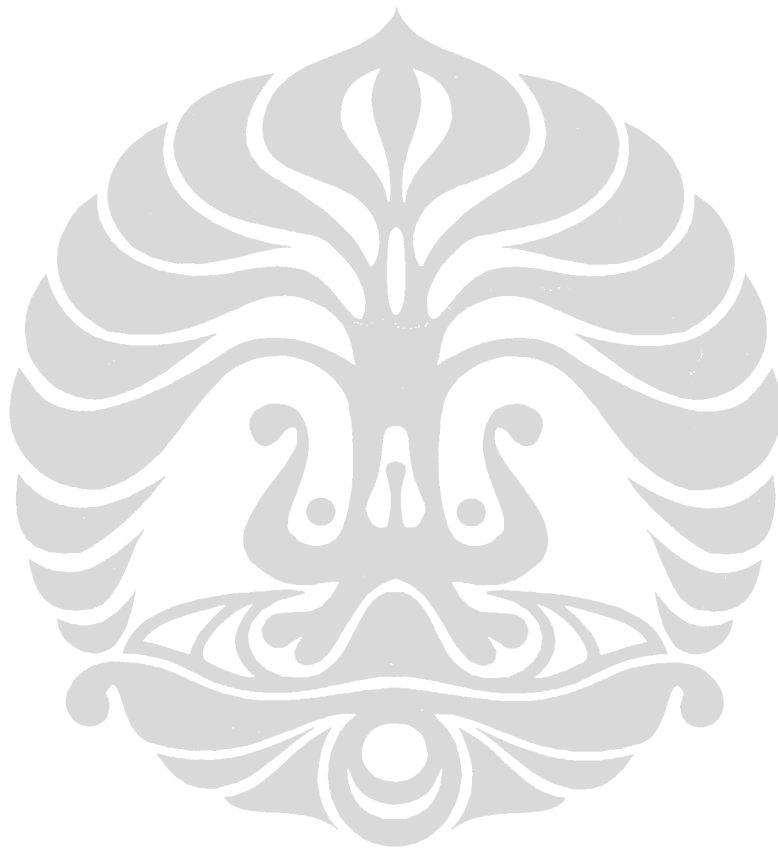
Dari hasil survey pada masyarakat yang terkena Proyek MHT, 75.5% menyatakan terlibat penuh dalam kegiatan Proyek MHT di kampungnya. Dari jumlah mereka yang terlibat, 48,25% menyatakan memberikan sumbangan secara

¹³⁵ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan.

¹³⁶ Wawancara dengan Bapak Djahrudin(61), Jln. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 4 Juli 2008.

¹³⁷ Soenarto. *Proyek Perbaikan Kampung Merupakan Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*. PPSIL. Jakarta, 1987. hlm. 50. Makalah Tidak Diterbitkan.

ikhlas tanah atau rumah mereka yang terpotong, 21.75% menyumbangkan tenaga dan pikiran, 5.5% tercatat dalam bantuan dana.¹³⁸



¹³⁸ Soenarto. *Ibid.*, hlm. 51.

BAB IV

Kondisi Kampung Setelah Perbaikan Proyek M.H.Thamrin 1969—1979

Setelah adanya pelaksanaan Perbaikan Kampung (Proyek MHT) selama 1969-1979 di Jakarta terlihat hasil-hasil yang nyata, karena pada dasarnya tujuan dari perbaikan kampung tersebut tercapai. Hal ini jelas terlihat dari hasil-hasil pelaksanaan fisik maupun kondisi sosial masyarakat Kampung di Jakarta yang makin meningkat. Dalam buku Gita Jaya Gubernur Ali Sadikin mengatakan :¹⁹⁵

“Dari hasil pengamatan terhadap pelaksanaan program ini saya dapat melihat adanya pengaruh positif terhadap masyarakat penghuni perkampungan yang diperbaiki, kesehatan masyarakat semakin meningkat, tingkat pendidikan yang dicerminkan dengan tingkat school enrolment naik pula, juga mobilitas penduduk bertambah yang selanjutnya saya harapkan berpengaruh pula pada peningkatan kegiatan perekonomian”.

Hasil-hasil pelaksanaan program perbaikan kampung (Proyek MHT) telah membawa perubahan terhadap wajah kota Jakarta, terutama terhadap kampung-kampung di Jakarta. Sebelum adanya Proyek MHT keadaan kampung-kampung di

¹⁹⁵ Gita Jaya. *Op. Cit*, hlm. 261.

Jakarta masih buruk, jalan di kampung-kampung keadaannya rusak dan masih berupa tanah, apabila terjadi hujan di samping terjadi genangan juga keadaannya becek. Hal tersebut terjadi di kampung Pulo Besar, Rawa Badak, Kemayoran dan Kebon Bawang. Daerah tersebut termasuk wilayah dataran rendah, hampir setiap tahun daerah ini dilanda banjir.

Gambar 3
Jalan kampung yang sudah diperbaiki



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali*)

Dari segi lingkungan fisik, masyarakat mengatakan bahwa dengan adanya Proyek MHT maka jalan, gang tidak becek lagi, sehingga memudahkan lalu-lintas bagi pejalan kaki, khususnya bagi mereka yang rumahnya terletak di gang-gang yang jauh dari jalan utama, seperti yang dirasakan warga kampung Rawa Badak.¹⁹⁶ Untuk masyarakat golongan menengah ke bawah yang tidak mampu berlangganan air bersih kepada Perusahaan Air Minum (PAM) secara perorangan, dapat terpenuhi dengan dibangunnya *hydrant-hydrant* umum. Mengenai penyediaan sarana air bersih dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini:

Gambar 4
Sarana penyediaan air bersih yang telah dibangun



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali*)

¹⁹⁶ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

Program Perbaikan kampung di Jakarta pada mulanya diperkirakan akan selesai dalam 15 tahun, dapat dipercepat dengan adanya bantuan Bank Dunia sejak Pelita II menjadi 10 tahun.¹⁹⁷ Tanggapan terhadap hasil perbaikan kampung di Jakarta juga diutarakan oleh Presiden Bank Dunia, Wolfensohn menulis dalam suratnya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin:¹⁹⁸

“kepemimpinan anda yang inspiratif memainkan peran sangat penting sekali dalam membuat Perbaikan Kampung sukses. Program itu memperbaiki kehidupan warga kota Jakarta yang paling miskin, dan memberikan kesempatan dan harapan. Sebelum perbaikan kampung diperkenalkan pada tahun 1969, hampir 70% kawasan perumahan di Jakarta dalam keadaan mengerikan. Program itu telah merubah lebih dari 8000 hektar kampung, membuat kota lebih hidup dan kompetitif. Sebagai tambahan, sukses program itu di Jakarta mendorong kebijakan yang serupa di seluruh Indonesia, dan banyak negara-negara lain, sehingga mengubah kehidupan dan mata pencaharian orang yang tak terhitung banyaknya di seluruh dunia berkembang. Pelajaran yang pantas dipelajari dan contoh positif dari proyek itu sampai sekarang masih relevan”.

Menurut hasil survey yang dilakukan Bank Dunia, dengan adanya program perbaikan kampung di Jakarta mendorong meningkatnya nilai dari tanah di kampung-kampung yang sudah diperbaiki. Untuk biaya air minum pun menjadi murah, sehubungan berkurangnya pembelian-pembelian dari pedagang air. Keuntungan-keuntungan yang tidak langsung adalah yang lebih penting, tetapi sulit diukur dari pada keuntungan-keuntungan yang langsung. Hal itu meliputi peningkatan keadaan kesehatan, kualitas air minum, jalan-jalan yang semakin baik dan bersih serta

¹⁹⁷ Bappem MHT. *Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT)*. Op. Cit, hlm. 5.

¹⁹⁸ Darrundono. *Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung, Studi Kasus : Proyek Muhammad Huni Thamrin di Jakarta*. Op. Cit, hlm. 15. Tidak Diterbitkan.

terwujud dan meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat di perkampungan. Nurhasanah (51) mengaku bahwa dengan tersedianya *hydrant* di kampungnya sangat memudahkan baginya untuk memperoleh air bersih.¹⁹⁹

Pada dasarnya program perbaikan kampung ialah mengarah pada program sosial, yaitu suatu program yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung. Tanggapan positif masyarakat kampung jelas terlihat pada saat pelaksanaan proyek ini berjalan, bahkan ketika masyarakat ditanya mengenai kerugian-kerugian yang mereka alami pada saat pelaksanaan Proyek MHT, di mana tanah dan halaman rumah mereka terpotong untuk pelebaran jalan, gang atau pembuatan selokan. Menurut Djahrudin (61) warga Utan Panjang, kerugian tersebut tidak lagi menjadi berarti bila dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh setelah kampung mereka diperbaiki. Dengan adanya sarana yang dibangun di kampungnya seperti jalan yang diaspal, lampu-lampu penerangan, serta tersedianya MCK betul-betul dimanfaatkan kegunaannya.²⁰⁰

Pada akhir Pelita I tahun 1974, kampung-kampung di Jakarta yang sudah diperbaiki berjumlah 89 buah di 17 buah kecamatan yang mencakup luas 2.400 Ha dengan jumlah penduduk 1.200.000. pada umumnya terdiri dari kampung-kampung yang dibangun sebelum tahun 1956, terletak di daerah Pusat Kota dengan tingkat kepadatan penduduknya rata-rata mencapai 500 jiwa per Ha. Sedangkan Pada Pelita

¹⁹⁹ Bappem Proyek Mohammad Husni Thamrin. *Laporan Peninjauan dari Rombongan Economic Development Institute Bank Dunia Mengenai Perbaikan Kampung (Proyek MHT) di Jakarta*. Jakarta, 1976. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hlm. 5.

²⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Djahrudin(61), Jln. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 4 Juli 2008.

II, secara keseluruhan Program Perbaikan Kampung telah memecahkan masalah sebanyak 242 buah kampung yang tersebar pada 88 wilayah kelurahan di 11 wilayah kecamatan, dengan luas jangkauannya sebanyak 5.806 Ha, yang dapat dinikmati oleh 1.918.411 jiwa penduduk yang ada di kampung-kampung di Jakarta, Untuk dana sebesar Rp. 28.818,59,- per jiwa. Secara keseluruhan program perbaikan Kampung pada Pelita II telah menghabiskan dana sebesar Rp. 55.285.909.604,-.²⁰¹ Di bawah ini terdapat tabel yang menjelaskan tentang jumlah keseluruhan kampung yang sudah diperbaiki serta jumlah biaya yang dihabiskan pada Pelita I- Pelita II:²⁰²

Tabel 3
Jumlah keseluruhan Kampung-kampung yang sudah diperbaiki tahun 1969-1979

Periode	Jumlah Kampung	Luas Kampung (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Biaya (Rp)
Pelita I	89	2.400	1.200.000	6.476.093.221,-
II	242	5.806	1.918.411	55.285.909.604,-
	331	8.206	3.118.411	61.762.002.823

Sumber: Media Jaya. No. 7 tahun XI 1986

²⁰¹ Ratu Husmiati. *Op. Cit*, hlm. 126. tidak diterbitkan.

²⁰² Media Jaya. *Loc. Cit*, hlm. 5.

Proyek Perbaikan Kampung (Proyek MHT) tahun 1969-1979, telah mendapat tanggapan positif dari Dunia Internasional, karena dianggap sebagai proyek perkotaan yang terbesar di Indonesia dengan biaya yang relatif murah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat kampung. Hal ini terbukti dengan ikut sertanya Bank Dunia dengan memberi pinjaman dalam pembiayaan. Proyek MHT juga mendapat penghargaan dari Agha Khan pada tahun 1980.²⁰³

A. Sarana dan Prasarana

Tujuan pelaksanaan perbaikan Kampung tahun 1969-1979 pada Pelita I dan Pelita II di Jakarta ialah menciptakan kondisi serta kualitas lingkungan kampung yang semakin baik dari keadaan sebelumnya. Dengan terciptanya kualitas lingkungan kampung yang baik, maka akan tercipta pula tempat pemukiman yang layak dan sehat. Hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat berupa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, mobilitas yang semakin tinggi, serta peningkatan daya kreativitas dan produktivitas. Dengan demikian pada akhirnya akan dicapai suatu masyarakat kampung yang sejahtera dalam lingkungan yang baik dan layak.

Sasaran utama yang mendesak untuk diperbaiki dan dibangun pada program perbaikan kampung di Jakarta ialah sektor prasarana dan sektor sanitasi yang selanjutnya diikuti pada sektor sarana kesejahteraan sosial. Kegiatan yang telah dilakukan pada Proyek M.H.T periode 1969-1979 ialah berupa perbaikan serta

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 7.

pembangunan sarana dan prasarana. Adapun perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana secara keseluruhan pada tahun 1969-1974 serta biaya yang dikeluarkan, di antaranya yang terdapat dalam tabel berikut :²⁰⁴

Tabel 4
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Proyek MHT
tahun 1969-1979

No.	Nama Proyek	Volume	Biaya
1.	Jalan Kendaraan	187.870 m	3.009.741.810,95
2.	Jalan Orang	230.830 m	1.242.583.931,95
3.	Jembatan Kendaraan	66 bh	209.252.060,57
4.	Jembatan Orang	53 bh	32.889.299,84
5.	Trafo Pembagi Listrik	3 bh	25.964.748,20
6.	Saluran Penghubung	128.200 m	1.217.716.833,66
7.	Kincir Angin	27 bh	151.098.210,01
8.	Rehabilitasi Pipa Air	103.060 m	226.682.170,68
9.	Hydrant Umum	46 bh	16.130.286,18
10.	Boosterpump/Deep well	3 bh	14.197.100,66
11.	Puskesmas	17 bh	167.867.173,50
13.	M.C.K	60 bh	90.781.330,01
14.	Bak Sampah	321 bh	17.726.073,67
15.	Gerobak Sampah	276 bh	20.941.785,73
16.	Rambu-rambu Lalu Lintas	1.802 bh	7.992.985,50
17.	Survey dan Pengendalian	89 kp	24.527.420,40
	Jumlah		6.476.093.221,51

Sumber: Gita Jaya. 1977.

²⁰⁴ Gita Jaya. *Op. cit.*, hlm. 269.

Hasil yang dicapai dari Program Perbaikan Kampung dalam Pelita I (1969-1974), sebanyak 89 buah kampung di Jakarta yang telah ditangani masalah pembangunannya, kampung-kampung itu tersebar pada 59 wilayah kelurahan dan 17 wilayah kecamatan dengan luas 2.400 ha yang berpenduduk 1.200.000 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 500 jiwa per hektar.²⁰⁵

Pada tahun pertama dan kedua pelita II 1974-1976, kegiatan yang telah dilakukan pada Program perbaikan kampung ini adalah, untuk perbaikan serta pembangunan tempat mandi, cuci dan kakus, jamban berjumlah 135 buah untuk 77 kampung di Jakarta, bak sampah berjumlah 107 buah serta gerobak sampah berjumlah 165 buah sedangkan untuk penyediaan sarana kesejahteraan sosial meliputi pembangunan puskesmas berjumlah 25 buah, pos kesehatan dan tempat pendidikan berupa bangunan SD sebanyak 54 buah. Untuk setiap perbaikan/pembangunan yang dilakukan pada tahun pertama Pelita II 1974-1975 di antaranya terdapat pada tabel berikut:²⁰⁶

Tabel 5
Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Proyek MHT
tahun 1974-1975

No.	Nama Proyek	Volume	Biaya
1.	Jalan Kendaraan	85.696 m	2.486.967.427,75
2.	Jalan Orang	174.119 m	1.637.252.509,14

²⁰⁵ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm 126.

²⁰⁶ Gita Jaya. *Op. Cit.*, hlm. 269.

3.	Jembatan Kendaraan	26 bh	78.538.523,32
4.	Jembatan Orang	43 bh	41.227.143,72
5.	Trafo Pembagi Listrik	-	-
6.	Saluran Penghubung	41.265 m	937.465.604,98
7.	Kincir Angin	-	-
8.	Rehabilitasi Pipa Air	16.990 m	98.331.854,23
9.	<i>Hydrant</i> Umum	324 bh	373.885.516,52
10.	Boosterpump/Deep well	7 bh	108.219.051,17
11.	Puskesmas	-	-
13.	M.C.K	69 bh	182.164.468,75
14.	Bak Sampah	26 bh	2.644.079,08
15.	Gerobak Sampah	125 bh	14.993.526,25
16.	Rambu-rambu Lalu Lintas	2.200 bh	27.071.204,60
17.	Survey dan Pengendalian	53 kp	127.000.000,-
18.	Perbaikan Bangunan Sosial yan terkena MHT	31 bh	13.738.780,87
	Jumlah		6.129.499.690,38

Sumber: Gita Jaya. 1977.

Secara keseluruhan, untuk prasarana yang dibangun pada Pelita II tidak jauh beda dengan prasarana yang dibangun pada Pelita I. Perbedaannya sendiri terdapat pada bertambahnya penyediaan sarana kesejahteraan sosial berupa pembangunan/perbaikan sarana pendidikan dan balai-balai rakyat.

Pada Pelita II (1974-1979), secara keseluruhan program perbaikan kampung telah memecahkan masalah sebanyak 242 buah kampung yang tersebar pada 88 wilayah kelurahan di 11 wilayah kecamatan. Dengan luas jangkauannya sebanyak

5.806 Ha, yang dapat dinikmati oleh 1.918.411 jiwa penduduk yang ada di kampung-kampung di Jakarta, untuk dana sebesar Rp. 28.818,59,- per jiwa. Secara keseluruhan Program Perbaikan Kampung pada Pelita II telah menghabiskan dana sebesar Rp. 55.285.909.604,-.²⁰⁷

Sarana fisik kampung yang menjadikan ciri bahwa kampung tersebut telah diperbaiki lewat proyek MHT adalah dengan tersedianya sarana MCK dan *hydrant* untuk kebutuhan air bersih. *hydrant* adalah sarana penyediaan air bersih yang bersumber dari ledeng atau pompa. Dengan dibangunnya *hydrant* dapat dirasakan manfaatnya untuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih, terutama untuk minum dan masak. Hampir sebagian besar masyarakat kampung di Jakarta menggunakan sarana ini, sebagian lagi ada yang menggunakan ledeng atau berlangganan pada Perusahaan Air Minum (PAM) secara perorangan.²⁰⁸ Besarnya pengguna *hydrant* antara lain disebabkan padatnya lingkungan di daerah kampung menyebabkan sukar bagi masyarakat untuk mendapat sumber air bersih. Sedangkan untuk berlangganan kepada Perusahaan Air Minum (PAM) secara perorangan, umumnya masyarakat kampung belum mampu.

Demikian pula dengan sarana MCK, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat kampung. Karena padatnya pemukiman, menyebabkan sulit bagi penduduk kampung untuk menyediakan tempat khusus untuk sarana ini di rumah mereka, namun MCK yang telah dibangun melalui proyek MHT di kampung-

²⁰⁷ Ratu Husmiati. *Op. Cit.*, hlm. 126.

²⁰⁸ J. Supranto. *Loc. cit.*, hlm. 80-85

kampung masih memiliki kekurangan diantaranya penempatan yang tidak sesuai dan jauh dari pemukiman warga, sehingga masyarakat yang justru membutuhkan sarana ini tidak dapat memanfaatkannya.

Sarana lain yang dirasakan besar manfaatnya adalah Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat). Tetapi untuk sarana ini tidak di semua kampung dibangun Puskesmas. Menurut Zuhaimi (69) dengan adanya Puskesmas masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan, sebelumnya masyarakat harus menempuh jarak jauh untuk pergi ke rumah sakit dan mengeluarkan biaya mahal. Untuk masalah perumahan sendiri, proyek ini tidak berarti menyediakan perumahan tetapi hanyalah berupa penerangan/penyuluhan rumah sehat. Hal ini penting karena pada kenyataannya bahwa wilayah-wilayah perkampungan yang sudah diperbaiki penduduknya memenuhi syarat-syarat minimal, maka dalam perbaikan-perbaikan rumah tersebut dibimbing oleh pemerintah DKI Jakarta baik tentang jenis bangunan-bangunannya maupun dari segi syarat-syarat kesehatan.²⁰⁹

Djhrudin (61) warga kampung Utan Panjang, ia melihat adanya pemanfaatan sarana kampung yang di bangun Proyek MHT seperti *hydrant*, MCK, Puskesmas, jalan-jalan serta selokan.hal lain juga diutarakan maka diketahui bahwa terdapat partisipasi yang tinggi dalam pemanfaatan sarana kampung hasil Proyek MHT, dalam

²⁰⁹ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

arti bahwa sarana yang telah dibangun tersebut memang memberi manfaat bagi warga sekitar Kampung Utan Kayu.²¹⁰

B. Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kampung

Secara umum tanggapan dan sikap masyarakat di daerah perkampungan terhadap Proyek MHT di Jakarta ternyata menggembirakan. Manfaat program ini sendiri yang berupa pembangunan/perbaikan fisik lingkungan betul-betul amat dirasakan masyarakat kampung. Hal ini mendorong meningkatnya kondisi sosial ekonomi di Jakarta.

Terhadap kampung-kampung yang telah diperbaiki melalui Proyek MHT berturut-turut diadakan penyelidikan sosial ekonomi pada masyarakat kampung. Pada tahun 1973-1977 dilakukan penyelidikan terhadap kampung-kampung yang sudah diperbaiki. Dari hasil pemantauan tersebut ditarik kesimpulan bahwa terdapat peningkatan keadaan sosial ekonomi terhadap masyarakat kampung, Dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana yang baik, perkampungan terbebas dari sumber-sumber penyakit. Hal ini dapat dirasakan karena tersedianya balai kesehatan seperti Puskesmas.²¹¹

Pada umumnya di semua wilayah yang terkena Proyek Perbaikan Kampung, komunikasi yang tadinya hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki dan bersepeda

²¹⁰ Wawancara dengan Bapak Djahrudin(61), Jln. Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 4 Juli 2008.

113. Darrundono. *Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung, Studi Kasus : Proyek Muhammad Huni Thamrin di Jakarta. Op. Cit.*, hlm. 10.

sekarang sudah dapat dilalui dengan becak, bemo, sepeda motor dan mobil sampai masuk pelosok-pelosok perkampungan. Di mana jarak yang lebih pendek pada sistem angkutan umum (bus) di pinggiran perkampungan juga menunjukkan rata-rata penghematan waktu yang didapat adalah 3,65 menit pada kampung yang diperbaiki sehubungan dengan peningkatan mutu konstruksi jalan.²¹² Pengaruh yang besar terhadap perbaikan jalan dirasakan warga kampung Pulo Besar dan warga kampung Rawa Badak, Hal ini menurut warga setempat memberi pengaruh baik terhadap kehidupan sehari-hari warga kampung, walaupun masyarakat belum merasakan adanya kenaikan pendapatan, satu hal yang dapat dirasakan masyarakat di kampung Pulo Besar dan Rawa Badak ialah bahwa dengan adanya perbaikan kampung memacu meningkatnya harga atau nilai tanah/bangunan, adanya penghematan dalam pengeluaran untuk air bersih akibat tersedianya *hydrant-hydrant* umum, penghematan dalam pengeluaran pengobatan dengan adanya puskesmas, penghematan dalam biaya transportasi ke sekolah dengan adanya gedung sekolah dasar yang dekat dengan rumah tinggal mereka.²¹³

C. Masalah Lingkungan Kampung

Proyek MHT yang dimulai tahun 1969 oleh pemerintah DKI Jakarta selama Pelita I dianggap berhasil dengan baik dalam meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat kampung di Jakarta, namun pada akhir Pelita II kampung-kampung yang

²¹² *Rencana Pembangunan lima Tahun D.C.I Djakarta 1974/1975-1978/1979* . Op. Cit., hlm. 79.

²¹³ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

pada awal Pelita I mempunyai kepadatan penduduk yang rendah, yaitu sekitar 100 jiwa/hektar, meningkat menjadi 300-400 jiwa/hektar. Dari keadaan ini dapat dilihat bahwa arus urbanisasi ke Jakarta tetap tinggi dan persediaan perumahan masih tertinggal jauh dari permintaan, sehingga perkampungan merupakan pilihan untuk dijadikan tempat tinggal karena alasan-alasan kemudahan mendapatkan lahan yang murah.²¹⁴

Untuk perumahan, di dalam Rencana Induk DKI Jakarta 1965-1985 disebut bahwa tersedia tanah untuk perumahan seluas 26.400 Ha, dimana 60% dari penduduk Jakarta tinggal di kampung-kampung yang luasnya hanya 36% dari luas daerah yang tersedia, sebagian besar terletak di dalam wilayah Kota Dalam. Sejalan dengan konsentrasi-konsentrasi penduduk tersebut, maka untuk perumahan terjadi “kepincangan” dalam penyebarannya.²¹⁵

Dengan tidak berfungsinya sarana penyediaan air bersih juga menjadi kendala bagi warga kampung Warakas di Jakarta Utara, Alternatif pilihan masyarakat untuk memperoleh air bersih dari sumber air tanah tidak memungkinkan lagi karena sudah tercemar.²¹⁶ Beda halnya dengan kampung-kampung di wilayah Jakarta Selatan ketika dihadapi oleh masalah tidak berfungsinya sarana penyediaan air bersih, di mana penggunaan air tanah (sumur) masih memungkinkan karena belum tercemar.

²¹⁴ Darrundono. *Op. Cit.*, hlm. 10.

²¹⁵ Soenarto. *Proyek Perbaikan Kampung Merupakan Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*. PPSIL. Jakarta, 1987. hlm. 30. Makalah Tidak Diterbitkan.

²¹⁶ Wawancara dengan bapak Mahmud (68), Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 29 Juni 2008.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka prasarana yang dibangun pun mengalami penurunan kualitas, contohnya banyak hydrant-hydrant serta MCK yang telah dibangun proyek MHT tidak berfungsi sepenuhnya. Keadaan ini sungguh mengkhawatirkan terutama pada kampung-kampung di wilayah Jakarta Utara, seperti di kampung Kebon Bawang. Masyarakat setempat mengeluh terhadap tidak berfungsinya sarana tersebut, terpaksa warga harus membeli air bersih. Hal ini juga terjadi di kelurahan Kwitang di mana masyarakat mengeluh karena MCK yang dibangun, nyatanya tidak bisa digunakan karena airnya tidak keluar.²¹⁷

Masalah lain yaitu rusaknya jalan-jalan yang telah dibangun akibat berlebihan tekanan ganda pada kendaraan-kendaraan yang lewat, pelanggaran ini banyak disebabkan oleh kendaraan-kendaraan truk yang bermuatan berat. walau di beberapa jalan masuk telah dibuat penghalang seperti portal, para pengemudi truk seenaknya saja membuka dan masuk kejalan yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kendaraan sejenis truk.²¹⁸ Rusaknya jalan-jalan di kampung-kampung yang sudah diperbaiki juga diakibatkan oleh penggalian pipa air minum yang di lakukan pemerintah daerah, masalah ini terjadi di Kampung Raden Saleh kelurahan Cikini. Penggalian yang dilakukan tidak dilanjutkan dengan pengaspalan kembali.²¹⁹ Selain itu kerusakan terjadi pada tersumbatnya saluran-saluran kran karena limbah padat dan terjadinya erosi.

²¹⁷ *Poskota*, 19 Mei 1975.

²¹⁸ *Poskota*, 23 Januari 1976.

²¹⁹ *Poskota*, 4 Februari 1976.

Masalah yang timbul dari masyarakat kampung sendiri ialah masalah sikap mental. Sifat tradisional dan tingkat pendidikan masyarakat kampung yang belum dapat menerima norma-norma kehidupan kota yang menuntut tingkat disiplin hidup yang tinggi, mendorong masyarakat untuk tidak tanggap terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana setelah perbaikan. Contohnya banyak masyarakat kampung yang membuang sampah ke pinggir-pinggir jalan, saluran-saluran dan sungai sehingga menyebabkan penyumbatan pada musim penghujan.²²⁰

D. Peran Serta Masyarakat Terhadap Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pembagian tugas dan tanggung jawab pemeliharaan bangunan-bangunan/proyek yang telah dikerjakan pada perbaikan kampung tertuang dalam ketetapan Gubernur DKI Jakarta tanggal 14 Juli 1970 No. AB. 13/1/47/1970. Tugas pemeliharaan ini sebagian dibebankan oleh masyarakat setempat antara lain fasilitas sosial seperti jalan orang/setapak, M.C.K, bak sampah, gerobak sampah, saluran jalan kendaraan/jalan orang. Sedangkan bagian-bagian yang menjadi tugas pemerintah DKI Jakarta umumnya adalah pemeliharaan jalan kendaraan, jembatan, sekolah dan bangunan umum lainnya.²²¹

Keikutsertaan Camat, Lurah, Rw, Rt, serta Tokoh Masyarakat ialah berupa sosialisasi kepada masyarakat kampung yang terkena perbaikan Proyek MHT, hal

²²⁰ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008.

²²¹ Soenarto. *Op. Cit.*, hlm. 32.

tersebut menyangkut penjelasan serta penyuluhan tentang pemanfaatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun. Apabila masyarakat diikutsertakan dalam masa perencanaan dan pelaksanaan, maka masyarakat akan mengetahui cara perbaikan serta akan ikut serta memelihara hasil pembangunan tersebut.²²²

Pada umumnya terdapat kesadaran masyarakat kampung yang terkena Proyek MHT terhadap pemeliharaan hasil-hasil perbaikan, di mana sebagian besar dari mereka menghendaki agar pemeliharaan kampung dilakukan oleh pemerintah DKI bersama-sama dengan masyarakat.²²³ Untuk pemeliharaan jalan, gang dan selokan yang telah dibangun Proyek MHT tidak ada ketentuan khusus, pemeliharaan ditekankan pada kesadaran masing-masing warga yang berdekatan dengan sarana tersebut, kecuali untuk perawatan yang memerlukan biaya besar, biasanya dilakukan dengan cara gotong-royong antar warga atau menyerahkan hal tersebut pada pihak RT atau RW, selanjutnya pihak RT atau RW akan meneruskan kepada pihak yang berwenang atas sarana tersebut.²²⁴

Mengenai masalah sampah, masyarakat dapat langsung membuang sampah pada tempat pembuangan umum yang telah dibangun. Untuk biaya pengangkutan sampah dipungut iuran sukarela dari masyarakat kampung. Untuk pemeliharaan *hydrant* dilakukan oleh seorang warga yang mendapat wewenang dari ketua RT

²²² Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008

²²³ J. Supranto. *Loc. Cit.* hlm. 80-85.

²²⁴ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

setempat. Pengurus *hydrant* tersebut bertugas membayarkan uang pemakaian *hydrant* kepada pihak Perusahaan Air Minum (PAM). Jika ada kerusakan-kerusakan kecil pada *hydrant*, biasanya diperbaiki oleh masyarakat dengan cara gotong-royong, tetapi bila kerusakan tersebut dianggap berat maka pihak Perusahaan Air Minum (PAM) yang akan memperbaiki.²²⁵

Partisipasi masyarakat sesudah pelaksanaan perbaikan kampung juga nampak pada aspek-aspek di antaranya ikut memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan menanam tanaman hias di halaman masing-masing rumah. Selain itu membersihkan sarana MCK juga menjadi tanggung jawab masyarakat apabila setiap habis digunakan sehingga MCK tersebut akan tetap bersih dan tidak berbau serta bangunan akan tahan lama. Dari cara perawatan MCK, partisipasi dalam pemeliharaan sarana tersebut dipengaruhi oleh faktor kepentingan dari pemakainya. Masyarakat mau memelihara sarana kampung terutama disebabkan karena mereka menerima dan merasakan manfaat dari sarana tersebut, hal seperti ini terjadi di kampung Rawa Badak dan Pulo Besar, masyarakat kurang tanggap terhadap masalah kebersihan sarana MCK karena sebagian warga sudah mampu untuk membangun sarana MCK di rumahnya masing-masing.²²⁶ Untuk pemeliharaan Puskesmas yang telah dibangun, ada di bawah wewenang lembaga tersendiri dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta atau Departemen Kesehatan, dengan demikian untuk pemeliharaan sarana ini tidak melibatkan masyarakat setempat.

²²⁵ Wawancara Dengan Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008

²²⁶ Wawancara dengan Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Koja, Jakarta Utara. 4 Mei 2008.

BAB V

KESIMPULAN

Besarnya penduduk yang bermigrasi ke Jakarta era 60-an yang dilatarbelakangi oleh daya tarik kota Jakarta, membuat Pemerintah Daerah DKI Jakarta tidak sanggup untuk menyediakan daerah perumahan yang sehat mengakibatkan mereka yang bermigrasi memadati daerah perumahan kota yang sudah padat dengan menampung keluarga dan kenalannya. mereka menyewa rumah dengan harga yang mereka mampu (gubuk seadanya) tanpa fasilitas kesehatan lingkungan sama sekali.

Harapan masyarakat akan kehidupan yang layak di lingkungannya, tampaknya mendapat tanggapan positif dari pemerintah daerah. Program perbaikan kampung (Proyek MHT) yang dimulai tahun 1969 menjadi solusi untuk merubah keadaan kampung-kampung di Jakarta yang serba padat dan kotor. Dengan dilaksanakannya program perbaikan kampung telah mendorong terciptanya antara lain:

- a. Dengan diperbaikinya kampung, terdapat peningkatan penghasilan dan peningkatan atas harga tanah dan bangunan.

- b. Dengan dibangunnya sarana yang lebih baik mendorong meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat kampung.
- c. Dengan adanya perbaikan kampung mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan di lingkungan tempat tinggalnya.

Proyek Perbaikan Kampung (Proyek MHT) tahun 1969-1979, telah mendapat tanggapan positif dari Dunia Internasional, karena dianggap sebagai proyek perkotaan yang terbesar di Indonesia dengan biaya yang relatif murah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup masyarakat kampung. Hal ini terbukti dengan ikut sertanya Bank Dunia dengan memberi pinjaman pada tahun 1973.

Pada akhir Pelita I tahun 1974, kampung-kampung di Jakarta yang sudah diperbaiki berjumlah 89 buah di 17 buah kecamatan yang mencakup luas 2.400 Ha dengan jumlah penduduk 1.200.000. pada umumnya terdiri dari kampung-kampung yang dibangun sebelum tahun 1956, terletak di daerah Pusat Kota dengan tingkat kepadatan penduduknya rata-rata mencapai 500 jiwa per Ha. Sedangkan Pada Pelita II, secara keseluruhan Program Perbaikan Kampung telah memecahkan masalah sebanyak 242 buah kampung yang tersebar pada 88 wilayah kelurahan di 11 wilayah kecamatan, dengan luas jangkauannya sebanyak 5.806 Ha, dengan jumlah penduduk mencapai 1.918.411 jiwa. Secara keseluruhan program perbaikan Kampung pada Pelita II telah menghabiskan dana sebesar Rp. 55.285.909.604,-.

Dalam pelaksanaan terlihat adanya peran serta masyarakat terhadap Proyek MHT, pada saat pelaksanaan perbaikan maupun sesudah perbaikan. Pada saat

pelaksanaan Proyek MHT keikutsertaan masyarakat kampung berupa usulan-usulan rencana peletakan tapak dan garis, baik prasarana maupun sarana kota. Manfaat program ini sendiri yang berwujud prasarana fisik betul-betul amat dirasakan masyarakat kampung di Jakarta. Akan tetapi untuk mengurangi pertumbuhan penduduk yang pesat di Jakarta, nampaknya program ini tidak terlalu berpengaruh. Hal ini jelas terlihat dengan diperbaikinya kampung-kampung di Jakarta malah mendorong masyarakat migran datang dan menetap dan menempati daerah-daerah perkampungan.

Setelah perbaikan/pembangunan Proyek MHT terlihat adanya pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah dibangun, terutama pada sarana yang memang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari seperti jalan kendaraan, *hydrant*, MCK. Dari hal tersebut menandakan bahwa sarana yang telah dibangun Proyek MHT tersebut memang memberi manfaat bagi mereka yang tinggal di kampung-kampung di Jakarta.

Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di perkampungan Jakarta, perlu dipikirkan bagaimana cara mengatasinya. Pada daerah-daerah yang telah diperbaiki melalui Proyek MHT, masalah kepadatan penduduk cenderung menimbulkan terjadinya sikap ketidakpedulian kepada masalah kebersihan sanitasi lingkungan, kurang disiplin, dan masa bodoh. Apabila masalah ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan makin rusaknya fasilitas-fasilitas yang telah dibangun.

Daftar Pustaka

Arsip

- Badan Pelaksanaan Pembangunan (Bappem) Proyek Mohammad Husni Thamrin. *Laporan Peninjauan dari Rombongan Economic Development Institute Bank dunia Mengenai Perbaikan Kampung (Proyek Mohammad Husni Thamrin di Jakarta)*. Jakarta, Bappem, 1976.
- , *Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT)*. DKI Jakarta. 1974
- , *Lecture Pelaksanaan Proyek Muhammad Husni Thamrin (Perbaikan Kampung) DKI Jakarta*. Jakarta, Bappem, 1974.
- , *Pokok-pokok Pikiran Program Program Perbaikan Kampung Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Rencana Induk Kota Jakarta Tahun 1985-2005*. DKI Jakarta.
- Pemda DKI Jakarta. *Surat Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No.DIV-c. 13/3/40/1973 tanggal 20 September tentang: Proyek Perbaikan Kampung Sebagai Proyek Muhammad Husni Thamrin*. Jakarta. Pem. DKI Jakarta, 1973.
- Pemda DKI Jakarta. *Rencana Pembangunan lima Tahun D.C.I Djakarta 1974/1975-1978/1979*. Pemerintah Daerah DKI Jakarta, 1974.

Surat Kabar dan Majalah

- Berita Yuda*, 1971
Kompas. September 1969
Media Jaya. 1987.
Poskota, April 1975-1977
Prisma. 1977
Progress. 1975-1977
Sinar Harapan, 1972
Tempo. 1977
Widyapura. 1977-1979

Artikel

Baross, Zsu Zsa. "Prospek Perubahan Bagi Golongan Miskin Kota." *Prisma*, Juni 1980.

Bianpoen. "Pola Pemukiman di daerah Padat Penduduk di Jakarta". *Widyapura*, Januari 1977.

----- "Masalah Lingkungan Jakarta". *Widyapura*, Maret 1977.

----- "Perkampungan Kota : Kasus Jakarta". *Widyapura*, 1979.

Darundono. "Aspek-Aspek Sosial Dalam Pelaksanaan Perbaikan Kampung". *Widyapura*, Januari 1977.

Ir. Sutami. "Beberapa Pandangan Tentang Kebijakan Pemerintah Dalam Program Perbaikan Kampung dan Lingkungan Pemukiman". *Widyapura*, November 1976.

Oey, Mayling. "Jakarta dibangun Kaum Pendatang". *Prisma*, 5 Mei 1977 hal.25-31.

Sadikin, Ali. "Membangun Kota Jakarta Secara Konsepsionil dengan Azas-azas Management Yang Baik". *Widyapura*, Maret 1977.

Soejoto. "Kebijakan Bappenas Mengenai Lingkungan dan Perbaikan Kampung ditinjau dari Sosial dan Budaya". *Widyapura*, November 1976.

Singarimbun, Masri. "Urbanisasi Apakah Itu Suatu Problema". *Prisma*, 5 Mei 1977

Suprpto. "Hasil Survey Kampung-kampung DKI Jakarta yang Terkena Proyek M.H. Thamrin." *Prisma*, 5 Oktober 1973.

Soesanto, Sri Soewati. "Sanitasi Lingkungan Di Kota-kota Besar". *Prisma*, 1977.

Wirasardjono, Soetjipto. "Masalah Pencemaran Lingkungan di Daerah Padat Penduduk : Suatu Kasus di DKI Jakarta". *Prisma*, No. 1 tahun III Februari 1974.

Buku

- Abeyasekere, Susan. *Jakarta a History*. Oxford : Oxford Unyversity Press, 1987.
- A. Hanna, Willard. *Hikayat Jakarta*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Budiharjo, Eko. *Kota dan Lingkungan: Pendekatan Baru Masyarakat berwawasan Ekologi*. Jakarta : LP3ES, 2003.
- Ever, Dieter Hans. *Sosilogi Perkotaan : Urbanisasi dan Sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : LP3ES, 1986.
- Gita Jaya. *Catatan H. Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 1966-1977*. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1977.
- Hardi, Lasmidjah, dkk. *Jakarta-ku Jakarta-mu Jakarta-kita*. Jakarta : Yayasan Pecinta Sejarah, 1987.
- Heuken, Adolf. *Tempat-tempat Bersejarah di Jakarta*. Jakarta : Cipta Loka Caraka, 1997.
- Jellinek, L. *Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- K.H. Ramadhan. *Bang Ali Demi Jakarta 1966-1977*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- . *Pers Bertanya, Bang Ali Menjawab*. Jakarta : Pustaka Jaya, 1995.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- R. Soeprpto. *Arah Kebijakan Pembangunan DKI Jakarta*. Jakarta : Pemerintah DKI Jakarta, 1983.
- Sadikin, Ali. *Menggusur dan Membangun*. Jakarta: Indayu Press, 1977.
- Sedyawati, Edy, dkk. *Sejarah Kota Jakarta, 1950-1980*. Jakarta : Depdikbud, 1987.
- Soenarto. *Proyek Perbaikan Kampung Merupakan Perwujudan Peran Serta Masyarakat Dalam pengelolaan Lingkungan Hidup*. PPSIL Universitas Indonesia. Jakarta, 1987. Makalah Tidak Diterbitkan.

Suryomiharjo, Abdurrahman. *Pemekaran kota Jakarta*. Jakarta : Jembatan, 1977.

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Warmansyah. G.A, dkk. *Sejarah Revolusi fisik Daerah DKI Jakarta*. Jakarta : Eka Darma, 1977.

Disertasi

Darrundono. *Peran Modal Sosial Dalam Proyek Perbaikan Kampung, Studi Kasus : Proyek Muhammad Huni Thamrin di Jakarta*. Disertasi Program Pascasarjana Kajian Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Jakarta, 2007, Tidak Diterbitkan.

Tesis

Darrundono. *Pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup: Studi Kasus Kampung-kampung yang Sudah Diperbaiki Melalui Proyek MHT di Jakarta*. Tesis Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Jakarta, 1988, Tidak Diterbitkan.

Husmiati, Ratu : *Ali Sadikin dan Pembangunan Jakarta 1966-1977*. Tesis Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia. Depok, 2003, tidak diterbitkan.

Siswantari. *Kedudukan dan Peran Bek Betawi Dalam Pemerintahan Serta Masyarakat di Jakarta*. Tesis Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia. Depok, tidak diterbitkan.

Wawancara

Bapak Darrundono (73 tahun), Jln. Bangka III, Mampang Pela. Jakarta selatan. 18 mei 2008. Menjabat sebagai Sekretaris Bappem Proyek MHT 1974-1978, pada tahun 1980 menjabat sebagai Penanggung Jawab Bappem Proyek MHT.

Bapak H. Zuhaimi (69 tahun), Rawa Badak I, Rawa Badak, Koja. Jakarta Utara. 4 Mei 2008. Menjabat sebagai lurah Rawa Badak tahun 1975.

Bapak H. Rodjak (70 tahun), Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 8 Juni 2008.
Tokoh Masyarakat kampung Pulo Besar, menjabat sebagai ketua RW 011 tahun 1977.

Bapak Djahrudin (61) warga kampung Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. 4 Juli 2008.

Ibu Nurhasanah (51) warga kampung Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

Bapak Sumarno, warga kampung Pulo Besar, Sunter Jaya, Jakarta Utara. 5 Juli 2008

Bapak Rodjali (63) warga kampung Rawa Badak I, Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara. 5 Juli 2008.

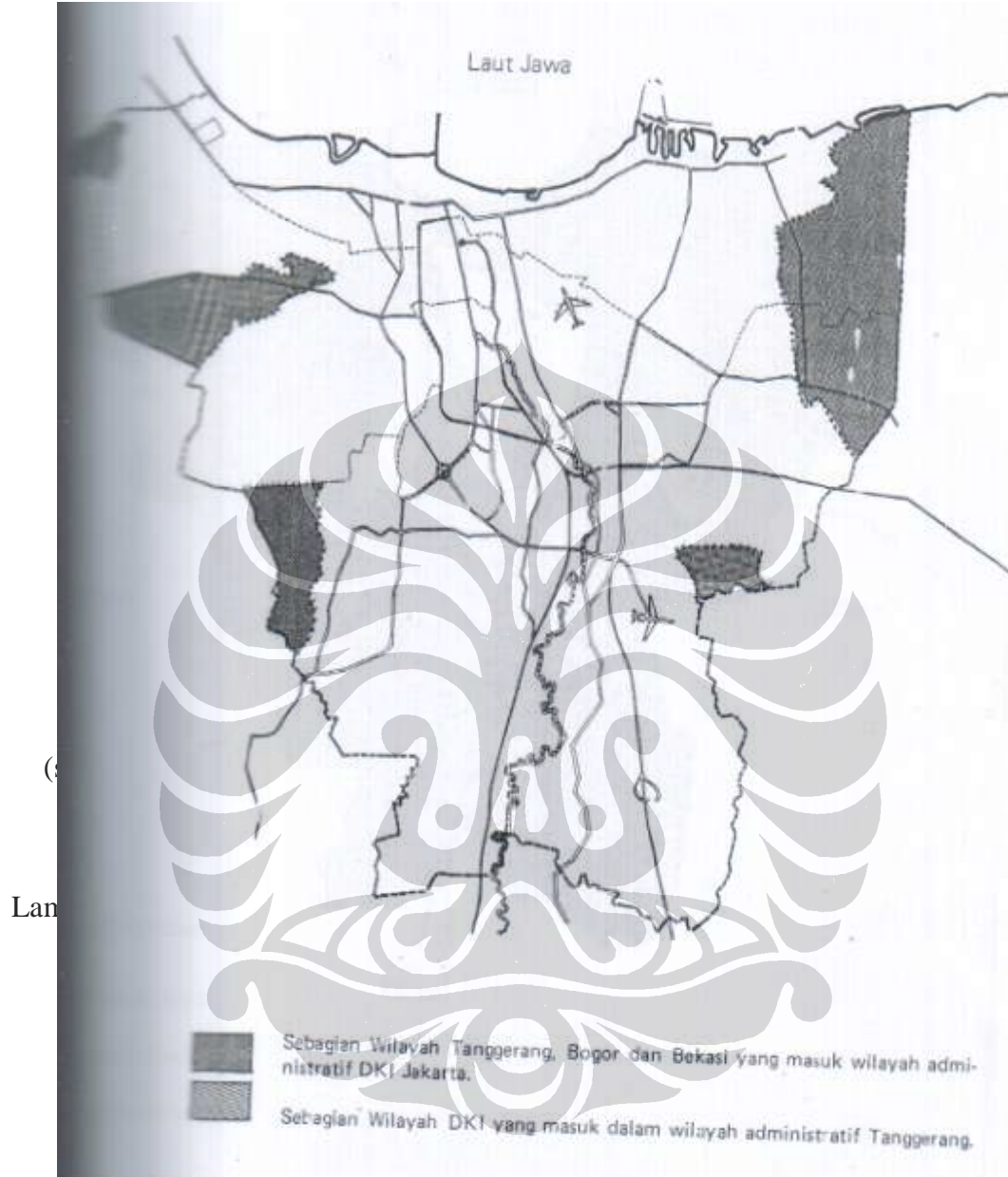
Bapak H. Madinah (59) warga kampung Kemayoran Kecil, Kemayoran, Jakarta Pusat. 6 Juli 2008.

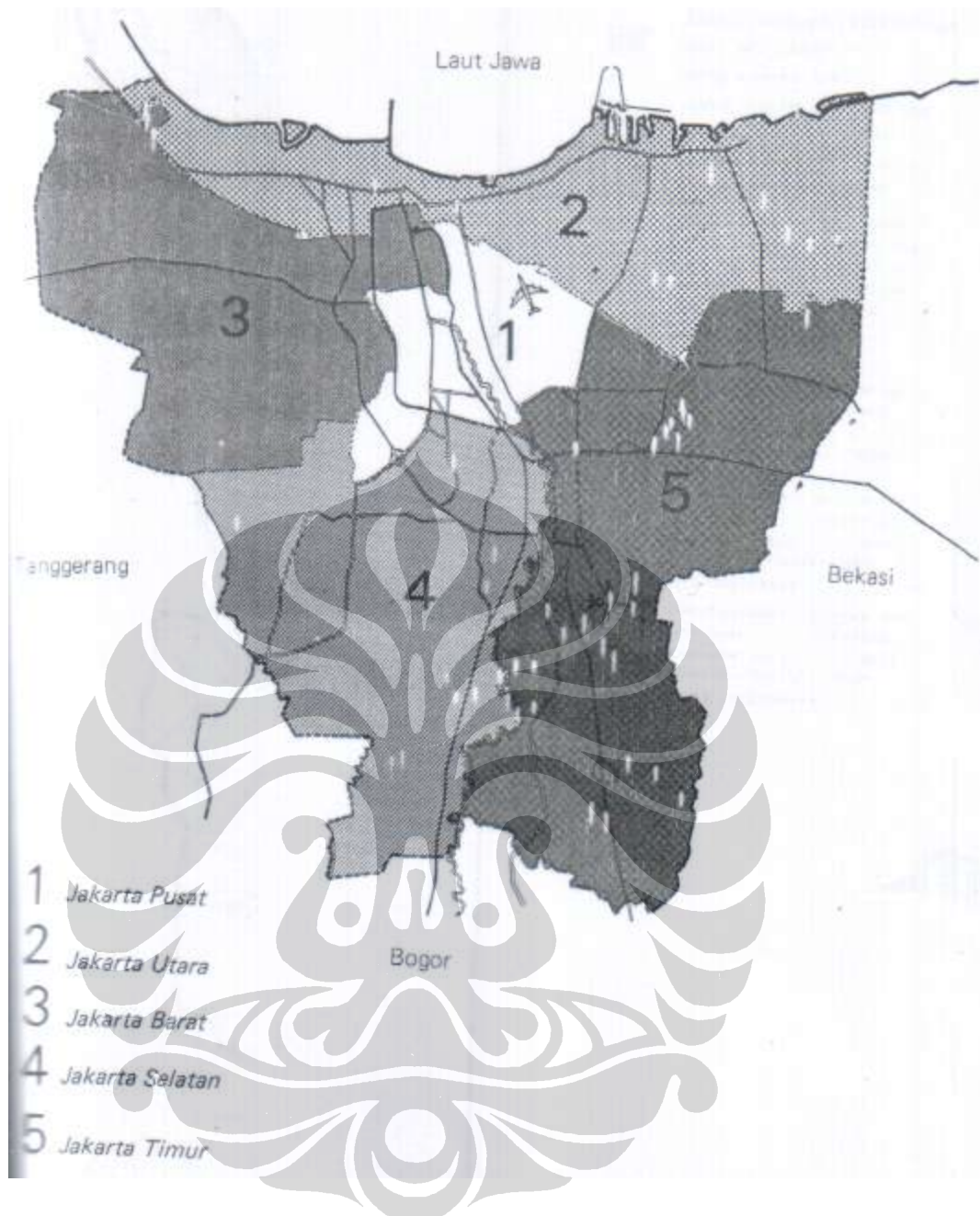
Bapak Mahmud (68) warga kampung Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 29 Juni 2008.



Lampiran 1

Peta Wilayah DKI Sebelum Pembulatan Wilayah Tanggal 24 Juli 1975

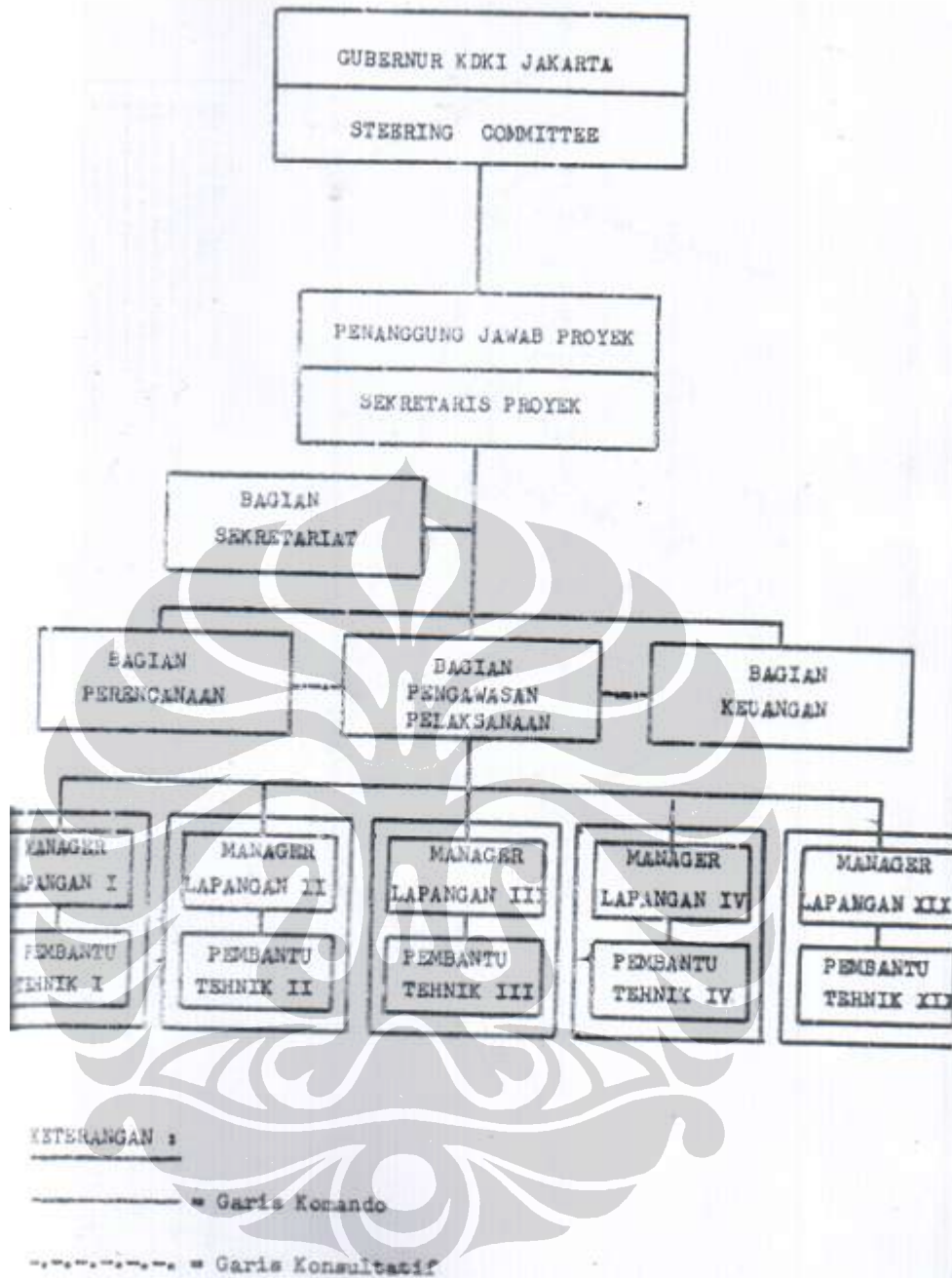




Sumber: Gita Jaya., *Catatan Ali Sadikin, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1966-1977*. pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jakarta, 1977, hlm. 65.)

Lampiran 3

Struktur Organisasi Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Mohammad Husni Thamrin DKI Jakarta



(Sumber: Bappem MHT. *Pokok-pokok Pikiran Program Program Perbaikan Kampung Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Rencana Induk Kota Jakarta Tahun 1985-2005*. DKI Jakarta.)

Lampiran 4

Network Diagram Proyek Muhammad Husni Thamrin DKI Jakarta

(Sumber: Bappem MHT. *Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT)*. DKI Jakarta. 1974)

Lampiran 5
Kampung-kampung yang terkena Perbaikan Proyek MHT awal Pelita I (1969) dan awal Pelita II (1974)

<u>Wilayah Kecamatan</u>	kelurahan	Kampung	Luas Ha	Penduduk Jiwa	Kepadatan Jiwa/Ha
1. <u>Jakarta Pusat</u> Kemayoran	Kemayoran	1. Kemayoran Kecil	22	11.894	540
2. <u>Jakarta Utara</u> Koja	Rawa Badak	2. Rawa Badak I	14,75	8.636	585
3. <u>Jakarta Barat</u> Tambora	Krendang	3. Krendang I	22,36	21.267	951
4. <u>Jakarta Selatan</u> Setia Budi	Pasar Manggis	4. Menteng Wadas	37,50	16.406	437
5. <u>Jakarta Timur</u> Matraman	Kayu Manis	5. Kayu Manis	24,75	13.385	540

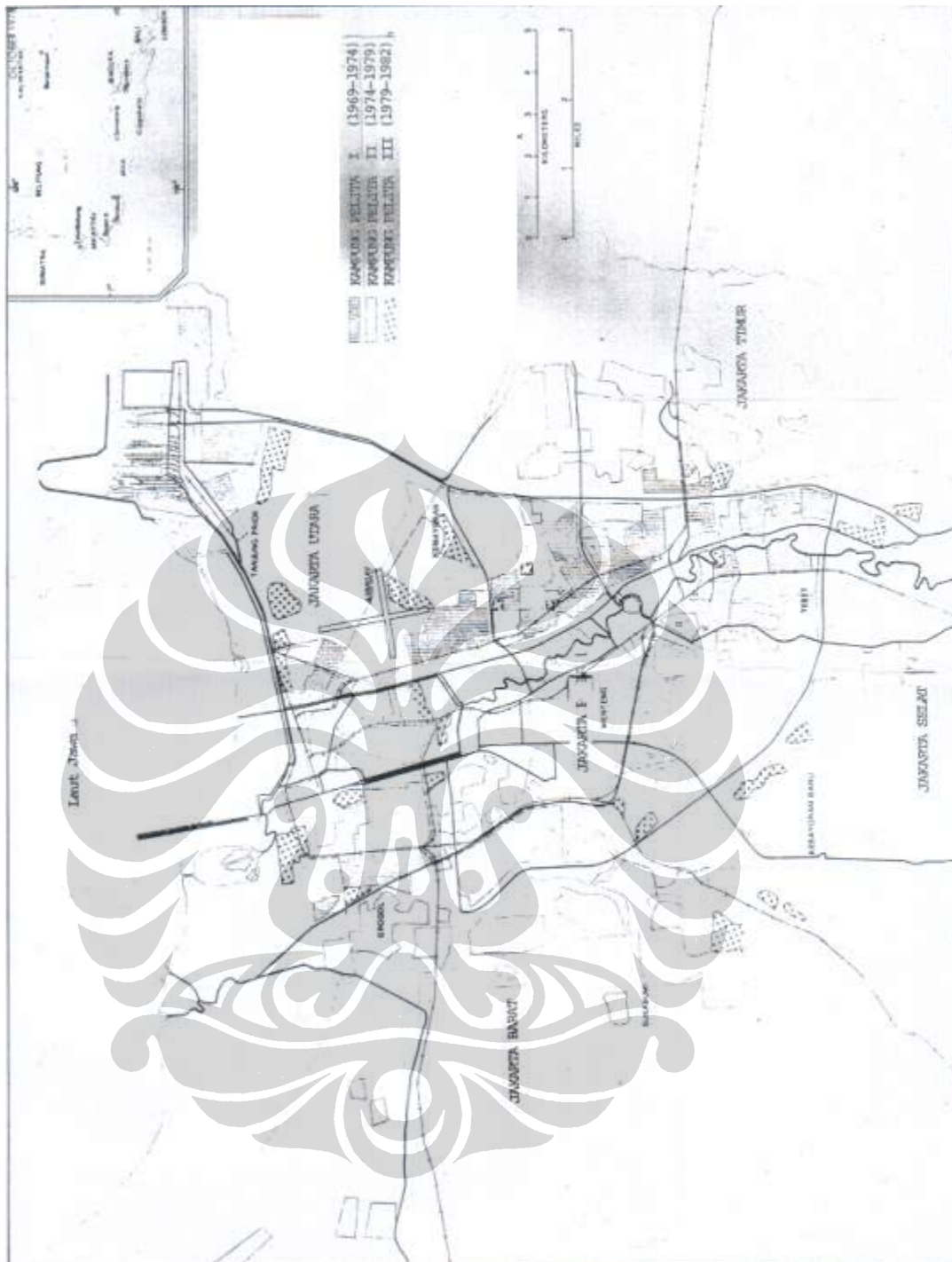
		Total	121,36	71.586	590
--	--	-------	--------	--------	-----

(Sumber: Bappem MHT. Pola Operasional Perbaikan Kampung (Proyek MHT). DKI Jakarta. 1974)

Lampiran 6

Peta Tahapan Pembangunan Proyek MHT di DKI Jakarta Pelita I-III (1969-1982)

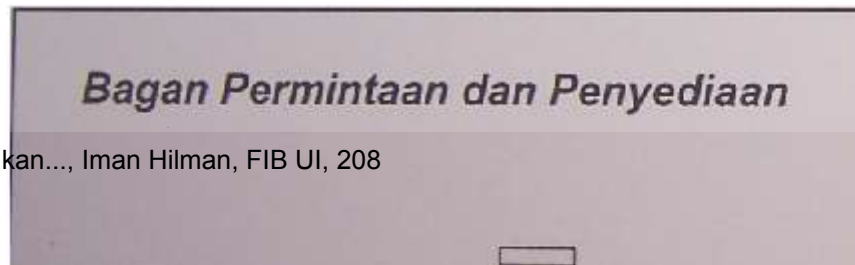




(Sumber: Darrundono. *Pengaruh Pertambahan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup: Studi Kasus Kampung-kampung yang Sudah Diperbaiki Melalui Proyek MHT di Jakarta*. Tesis Jurusan Ilmu Lingkungan, Universitas Indonesia. Jakarta, 1988, Tidak Diterbitkan.)

Lampiran 7

Bagan Permintaan dan Penyediaan Perumahan di DKI Jakarta 1960 dan Gambar Pemukiman Kumuh di Jakarta



Permukiman Kumuh

(St

ta)

Lampiran





Keadaan jalan yang masih rusak



(Sumber: Darrundono. A Tribute to Bang Ali.)

Lampiran 9

Pembangunan Jalan dan Jembatan Oleh Proyek MHT



Perbaikan jalan kampung



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali.*)

Lampiran 10

Gubernur Ali Sadikin Saat Meninjau Pelaksanaan Proyek MHT



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali.*)

Lampiran 11

Keadaan jalan yang Telah Diperbaiki Proyek MHT





Sarana sumur bor yang telah dibangun



(Sumber: Darrundono. *A Tribute to Bang Ali.*)

INDEKS

A

Agha Khan 70
Ancol 32
Angke 16, 44
APBD 40, 50, 56

B

Bappem MHT 5, 10, 48, 57, 59, 62
Bappenas 39, 40
Bank Dunia 5, 7, 8, 10, 41, 42, 50, 51,
52, 58, 67, 69
Batavia 12, 13
Betawi 27, 38
Big Village 35
Bosch, Van Den 12
Bukit Duri 38

C

Cacar 45
Cikini 78

D

Darrundono 6, 37, 47, 56
Demam berdarah 45
Dinas Tata Kota 23, 24, 48, 55
Djumadjitin 38
DPRD 40, 41, 52

E

F

G

Gemeente Batavia 12
Gubuk 29, 34, 38

H

Hydrant 54, 55, 66, 73, 74, 76, 78, 80,
81

I

J

Jakarta Tokubetsushi 13
Jatinegara 12, 38, 60
Jelambar 59
Jembatan Duren 59

K

Karet Karya Selatan 60
Kayu Manis 53
Kebon Bawang 44
Kebon Sereh 60
Kemayoran 12, 42, 57, 65
Kemayoran Kecil 53
Koja 59
Konservatif 38
Kramat Tunggak 33
Krendang 53

L

M

Matraman 60

MCK 4, 54, 55, 57, 68, 73-75, 78, 81
Menteng Wadas 53
Migrasi 30, 32, 33
Muntaber 45

N

Night club 33
Ngantung, Henk 15

O

Opname 49

P

PAM 44, 66, 74, 81
PBB 5, 41, 51, 58
PCD 5, 41, 50
Pelita 7, 40-42, 50-52, 55, 58-60, 66,
68-73, 77
Penjaringan 59
Planologi 2
Pulo Besar 44, 62, 76
Pulo Gadung 60
Puskesmas 46,72, 74-76, 81

Q

R

Rawa Badak 53, 57, 76, 81
Real estate 24, 36
Rehabilitasi 25, 41, 54
Rencana Induk 2, 5, 10, 20-22, 24, 34,
48, 77
Representatif 1, 17, 19, 20

S

Sadikin, Ali 1, 7, 9-12, 15-23, 25-27, 32,
38, 39, 40, 56, 64, 67
Septictank 45
Setia Budi 59

Sjamsuridjal 14
Soediro 15
Soekarno 15, 18, 19
Soemarno 15
Soewiryo 13, 14
Stadsgemeente Batavia 12, 13

T

Tanjung Priok 59
Tebet 52, 59

U

Urbanisasi 1, 2, 6, 11, 17, 21, 22, 27, 28,
29, 30, 33, 77
Utan Panjang 42

V

Verbeetering 38, 39
Volkstraad 38

W

Warakas 57, 57, 77
Watts, Kenneth 40
Wolfenshon 67

X

Y

Z

Zyeyaku 13
Zuhaimi 53, 61, 74

RIWAYAT HIDUP

IMAM HILMAN, lahir di Jakarta, 18 Januari 1985, adalah putra kedua dari pasangan suami istri Achmad Ubay Dillah dan Djahroh. Ia memperoleh pendidikan dasar dan menengahnya di SDN 010 Sunter Jaya dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 152 Jakarta Utara serta mendapat ijazah Sekolah Menengah Umum PGRI 12 Jakarta Utara pada tahun 2003. Ia melanjutkan studi di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Sejarah Kajian Indonesia selama lima tahun sebelum lulus dengan gelar Sarjana Humaniora. Semasa kuliah ia pernah menjabat sebagai anggota Studi Klub Sejarah, dan anggota Garda Hijau FIB UI.